

**PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (NPL)
PADA PT BPR BKK PATI (Perseroda)
KANTOR PUSAT OPERASIONAL**

**Laporan Magang MB-KM
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen**

Program Studi Manajemen



Diajukan oleh :

SUSILOWATI

NIM : 30401800333

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

SEMARANG

2021

**PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (NPL)
PADA PT BPR BKK PATI (Perseroda)
KANTOR PUSAT OPERASIONAL**

**Laporan Magang MB-KM
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen**

Program Studi Manajemen



Diajukan oleh :

SUSILOWATI

NIM : 30401800333

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN
Laporan Magang MB-KM
PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (NPL)
PADA PT BPR BKK PATI (Perseroda)
KANTOR PUSAT OPERASIONAL

Disusun oleh :

Susilowati

NIM : 30401800333

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Laporan Magang MB-KM
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Pati, 9 Desember 2021

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Supervisor



Dr. Drs.E. H. Marno Nugroho, MM

NIDN. 06.0803.6601

Sutomo, SE

HALAMAN PENGESAHAN
Kelulusan Laporan Magang MB-KM
PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (NPL)
PADA PT BPR BKK PATI (Perseroda)
KANTOR PUSAT OPERASIONAL


Disusun oleh :
Susilowati
NIM : 30401800333

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan


Dr. Drs. E. H. Marno Nugroho, MM
NIDN. 06.0803.6601

Penguji I



Drs. Bomber Joko Setyo Utomo, MM
NIK. 220485010

Penguji II


Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si
NIK. 210490020

Laporan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Tanggal 10 Januari 2022

Ketua Program Studi Manajemen


Dr. H. Ardian Adhiatma, SE, MM
NIK. 210499042

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susilowati

NIM : 30401800333

Program Studi : S1 Manajemen

Judul Laporan : Penanganan Kredit Bermasalah (NPL) pada PT BPR BKK
PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional

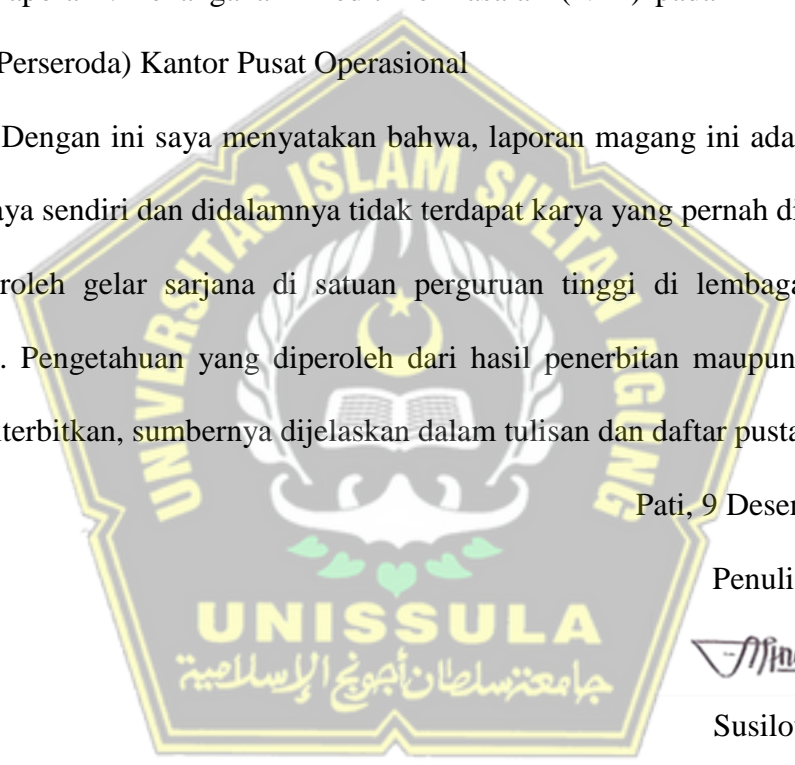
Dengan ini saya menyatakan bahwa, laporan magang ini adalah hasil dari kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di satuan perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Pati, 9 Desember 2021

Penulis



Susilowati



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the factors causing the emergence of Non-Performing Loans and to find out how to handle Non-Performing Loans at PT BPR BKK PATI (Perseroda). The research method in this report is a descriptive research method with a qualitative approach. The object of study in this report is the handling of Non Performing Loans at PT BPR BKK PATI (Perseroda) Operational Head Office. The results of 1) The occurrence of Non-Performing Loans at PT BPR BKK PATI (Perseroda) was more dominantly caused by external customer factors, namely a decrease in the debtor's business turnover, sudden layoffs occurred at the debtor's workplace, and unexpected situations such as natural disasters or pandemics like this time. 2) Efforts to handle Non-Performing Loans are carried out by 2 methods, namely handling existing Non-Performing Loans and preventing the emergence of new Non-Performing Loans. Handling efforts carried out by PT BPR BKK PATI (Perseroda) with repressive measures, namely using rescheduling, reconditioning and restructuring efforts. Then preventive action is an efforts to supervise credit surveys properly, carefully according to credit SOPs, every debtor must be traced through SLIK, and always guided by 5C credit analysis with an objective assessment.

Keywords : Non Performing Loans (NPL), BPR, Handling.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya kredit bermasalah serta mengetahui bagaimana penanganan dari kredit bermasalah di PT BPR BKK PATI (Perseroda). Metode penelitian dalam laporan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Obyek kajian dalam laporan ini adalah Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional. Hasil penelitian 1) Terjadinya kredit bermasalah di PT BPR BKK PATI (Perseroda) lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal nasabah yaitu penurunan omzet usaha debitur, terjadinya PHK mendadak di tempat kerja debitur, serta situasi diluar dugaan seperti bencana alam atau pandemi seperti saat ini. 2) Upaya penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan 2 metode yaitu penanganan terhadap kredit bermasalah yang ada serta pencegahan munculnya kredit bermasalah baru. Upaya penanganan yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) dengan Tindakan represif yaitu menggunakan upaya Rescheduling, Reconditioning, serta Restructuring. Kemudian Tindakan preventif dengan upaya melakukan pengawasan survey kredit dengan benar, hati-hati sesuai SOP perkreditan, Setiap debitur wajib ditelusuri melalui SLIK, srta selalu berpedoman pada analisa kredit 5C dengan penilaian secara obyektif.

Kata Kunci : Non Performing Loan (NPL), BPR, Penanganan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan yang berjudul : **“PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (NPL) PADA PT BPR BKK PATI (Perseroda) KANTOR PUSAT OPERASIONAL”**

Penulisan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Mengingat adanya keterbatasan pengetahuan, kemampuan, pengalaman penulis dalam penyusunan laporan, maka banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran, petunjuk hingga terselesainya penyusunan laporan ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati yang paling dalam serta rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Olivia Fachrunnisa, SE.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memfasilitasi dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. H. Ardian Adhiatma, SE selaku Ketua Prodi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun laporan ini.
3. Bapak Dr.Drs.E.H.Marno Nugroho,MM selaku dosen pembimbing lapangan yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu, membimbing, mengarahkan serta memberikan saran kepada penulis.

4. Bapak Sutomo,SE selaku dosen supervisor serta seluruh Direksi dan pegawai PT BPR BKK PATI (Perseroda) yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu selama masa magang.
5. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan, memberikan support, dukungan dan semangat kepada penulis.
6. Semua sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan laporan ini. Semoga penulisan laporan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan laporan ini. Terimakasih.

Pati, Mei 2021

Penulis



Susilowati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	8
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG	8
2.1 Profil organisasi.....	8
2.1.1 Sejarah PT BPR BKK PATI (Perseroda).....	8
2.1.2 Bidang Usaha	13
2.1.3 VISI DAN MISI.....	20
2.1.4 BUDAYA KERJA	21
2.1.5 Stuktur Organisasi PT BPR BKK PATI (Perseroda).....	22

2.1.6 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	24
2.2 Aktivitas Magang	46
BAB III.....	51
IDENTIFIKASI MASALAH.....	51
BAB IV	56
KAJIAN PUSTAKA.....	56
4.1 Pengertian BPR	56
4.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit	57
4.2.1 Pengertian Kredit	57
4.2.2 Analisa Kredit	57
4.2.3 Prosedur Pemberian Kredit	59
4.2.4 Pengertian Kredit Bermasalah.....	60
4.2.5 Penyebab Kredit Bermasalah	61
4.2.6 Ukuran Kolektibilitas Kredit.....	62
4.2.7 Penanganan Kredit Bermasalah	64
4.3 Tinjauan Tentang Kredit Dalam Perspektif Islam.....	66
4.3.1 Dasar Hukum Islam Tentang Kredit atau Pembiayaan	66
4.4 Restrukturisasi Kredit.....	68
4.4.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit	68
4.4.2 Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Kredit	69
4.4.3 Alasan Restrukturisasi Kredit	70
4.5 Motivasi Kerja	71
4.5.1 Pengertian Motivasi Kerja.....	71
4.5.2 Tujuan Motivasi Kerja	71
4.5.3 Teknik Motivasi Kerja	72

4.6	Teknologi Informasi	72
4.6.1	Pengertian Teknologi	72
4.6.2	Manfaat Teknologi	73
4.6.3	Tipe-tipe Teknologi.....	74
BAB V		76
ANALISIS DAN PEMBAHASAN		76
5.1	Permasalahan pada PT BPR BKK PATI (Perseroda)	76
5.2	Faktor Penyebab Kredit Bermasalah	81
5.3	Penanganan Kredit Bermasalah.....	85
BAB VI		92
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		92
6.1	Kesimpulan.....	92
6.2	Rekomendasi	94
6.2.1	Hasil Analisis	94
6.2.2	Perusahaan.....	94
6.2.3	Program Studi.....	96
BAB VII.....		97
REFLEKSI DIRI.....		97
DAFTAR PUSTAKA		102
LAMPIRAN.....		105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai NPL NETTO	4
Tabel 2.1 Tarif Bunga Deposito.....	15
Tabel 3.1 Rekap Nominatif (Tunggakan) Kredit dan NPL NETTO.....	52
Tabel 5.1 Kolektibilitas Kredit.....	80



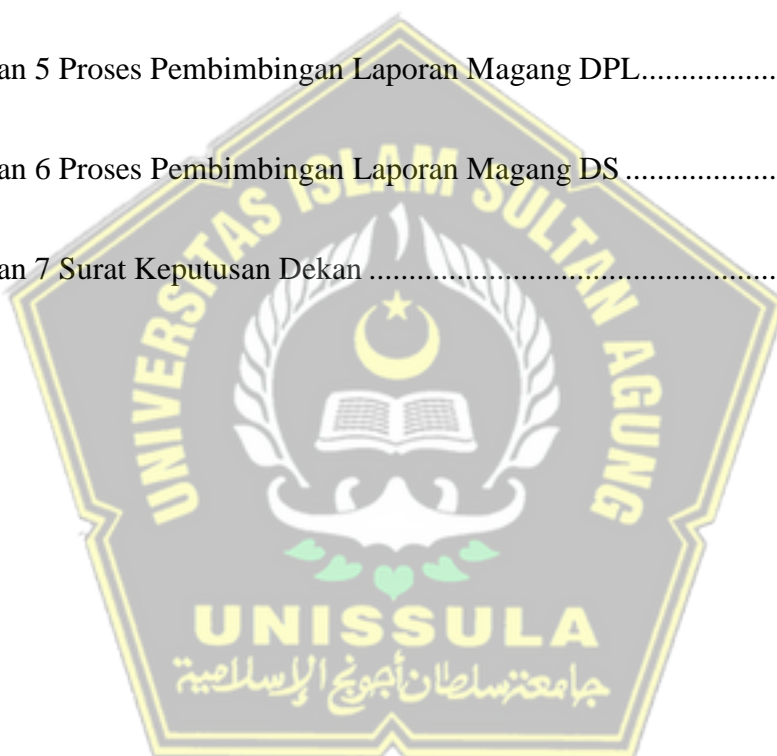
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	23
Gambar 2.2 Laporan Laba Rugi Publikasi OJK 2020.....	43
Gambar 2.3 Laporan Kualitas Aset Produktif Publikasi OJK 2020.....	45
Gambar 2.4 Kegiatan Doa Bersama.....	46
Gambar 2.5 Pemberian Kenang-Kenangan.....	50
Gambar 2.6 Perpisahan	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Permohonan Magang.....	105
Lampiran 2 Lembar Penilaian Laporan Magang	106
Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta MB-KM	110
Lampiran 4 Catatan Harian (LOG BOOK) Magang Perusahaan.....	116
Lampiran 5 Proses Pembimbingan Laporan Magang DPL.....	141
Lampiran 6 Proses Pembimbingan Laporan Magang DS	144
Lampiran 7 Surat Keputusan Dekan	146



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Oleh sebab itu, dalam kehidupan masyarakat lembaga keuangan berperan penting sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, maka bank harus dalam kondisi yang sehat. Hal ini sangat penting serta menjadi dasar penilaian kinerja suatu lembaga keuangan, supaya kelangsungan hidupnya dapat terjamin. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk mengawasi kegiatan operasional bank supaya tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

Semakin maraknya layanan keuangan non bank memberikan akses kemudahan serta kecepatan dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan menjadikan BPR tetap ada di industri keuangan. Begitu juga dengan Bank Umum dan Bank Asing yang gencar mengembangkan sektor kredit mikro yang menjadi andalan dari BPR(Sofyan 2019). Meningkatnya kebutuhan untuk memenuhinya

apalagi yang bersifat mendesak, sehingga sebagian besar masyarakat mengatasi hal tersebut dengan cara mengambil kredit atau pinjaman. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, hampir semua aktifitas manusia dibatasi. Sehingga muncul beberapa masalah yang dihadapi, terutama berkaitan dengan kondisi keuangan. Dengan banyaknya alasan kebutuhan yang berbeda-beda bagi setiap orang mulai dari kebutuhan primer, sekunder sampai kebutuhan tersier membuat lembaga keuangan seperti bank menjadi tujuan masyarakat untuk memecahkan masalah tersebut.

Kredit dinilai sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi tidak semua masyarakat yang mengajukan permohonan kredit paham tentang bagaimana alur pengajuan kredit, ketentuan-ketentuan kredit, serta tujuan dari pengajuan kredit. Misalnya seperti mengajukan pinjaman kredit untuk keperluan pengobatan. Pengajuan dengan alasan tersebut tentu tidak dapat dijadikan sebagai tujuan pengajuan kredit, dikarenakan dalam melakukan analisis kredit nanti dikhawatirkan calon debitur tidak sanggup mengembalikan pinjamannya kepada bank. Sehingga banyak dari calon debitur tidak memperhatikan masalah-masalah dalam pengajuan kredit.

Bank akan memberikan kredit kepada calon debitur dengan memperhatikan analisis kredit menggunakan faktor 5C, yaitu *Character* (Kepribadian), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan) serta *Condition* (kondisi perekonomian). Apabila calon debitur sudah

memenuhi syarat yang ditentukan terkait faktor 5C tersebut, maka kredit yang diajukan oleh nasabah pasti disetujui dengan syarat perjanjian nasabah dapat membayar kreditnya sesuai dengan perjanjian. Namun, dalam perjalanannya pemberian kredit kepada nasabah tidak selamanya berjalan sesuai dengan kesepakatan saat nasabah mengajukan pinjaman kredit. Hal tersebut memunculkan yang namanya kredit bermasalah. Penyebab munculnya kredit bermasalah adalah karena ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman pokok dan bunga (Wasiaturrahma et al. 2020).

Padahal salah satu ukuran kinerja bank dapat dilihat dari kelancaran kredit yang diberikan oleh bank kepada para debitur, yang biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). Semakin besar tingkat NPL suatu bank maka ukuran kinerja bank akan semakin buruk, untuk itu bank harus memperkecil tingkat NPL. Kredit Bermasalah (NPL) merupakan kredit yang masuk dalam kategori kredit kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan kriteria OJK Pasal 33. Akibat yang ditimbulkan dari adanya kredit bermasalah ini adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari kredit yang diberikan serta bank harus mengurangi pendapatan untuk Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sehingga mengurangi perolehan laba.

Berdasarkan informasi keuangan yang disusun untuk memenuhi peraturan OJK no.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK

No.16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR. Didapat hasil bahwa tingkat NPL Netto pada tahun 2018-2020 sebagai berikut :

No.	Tahun	Nilai NPL Netto	Keterangan
1.	2018	5,52%	Cukup Sehat
2.	2019	5,47%	Cukup Sehat
3	2020	4,73%	Sehat

Tabel 1.1

Nilai NPL NETTO

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat NPL NETTO pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dari PT BPR BKK PATI (Perseroda) yang sangat baik setiap tahunnya. Tingkat kredit bermasalah pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) bukanlah menjadi permasalahan utama melainkan bagaimana penanganan kredit bermasalah supaya tingkat kredit bermasalah setiap tahunnya selalu menurun karena tingkat NPL masih menjadi salah satu ukuran penilaian kinerja bank. Untuk itu penulis ingin membahas lebih lanjut dan menjadikan bahan penulisan Tugas Akhir dengan judul **PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (NPL) PADA PT BPR BKK PATI (Perseroda) KANTOR PUSAT OPERASIONAL .**

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Magang MB-KM dengan judul **“PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (NPL) PADA PT BPR BKK PATI (Perseroda) KANTOR PUSAT OPERASIONAL”** yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah (NPL) serta Bagaimana penanganan dari kredit bermasalah.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional mengacu pada pedoman pembuatan laporan magang Fakultas Ekonomi UNISSULA yang terdiri dari beberapa bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang yang menjabarkan tentang masalah di tempat magang yang dijadikan topik dalam laporan magang, tujuan dari penulisan topik serta sistematika laporan

BAB II : PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Mencakup karakteristik organisasi yang terkait dengan topik yang dibahas, proses penciptaan nilai untuk pemangku kepentingan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, praktik manajemen dalam membantu organisasi mencapai tujuan serta menguraikan seluruh aktivitas yang dilakukan di tempat magang.

BAB III : IDENTIFIKASI MASALAH

Menjelaskan tentang masalah yang diangkat sebagai topik utama dalam laporan magang yaitu tentang penanganan kredit bermasalah (NPL) pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional.

BAB IV : KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan teori yang digunakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan topik yang dipilih yaitu Penanganan Kredit Bermasalah pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional.

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan kembali masalah yang menjadi topik pembahasan yaitu tentang penanganan kredit bermasalah di PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional menggunakan teori atau metode yang relevan untuk menjelaskan dan membandingkan dengan masalah yang diangkat.

BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mencakup kesimpulan terhadap masalah yang dianalisis serta rekomendasi terkait hal-hal yang perlu diperbaiki organisasi terhadap peserta magang dan staf/karyawan secara keseluruhan.

BAB VII : REFLEKSI DIRI

Menjabarkan tentang hal-hal positif yang didapat mahasiswa selama perkuliahan sebagai bekal dalam menjalankan pekerjaan selama magang, seperti manfaat magang terhadap pengembangan soft-skill, kunci sukses dalam bekerja serta rencana pengembangan diri, karir dan pendidikan selanjutnya.



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil organisasi

2.1.1 Sejarah PT BPR BKK PATI (Perseroda)

Awal terbentuknya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang berkedudukan di Kecamatan Pati. Dasar Terbentuknya Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. Dsa.G.226/1969 Tanggal 4 September 1969 8/2/4. Dasar pergantian nama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.358/KM.13/1991 Tanggal 8 Oktober 1991 Tentang Pemberian Ijin Usaha Sebagai BPR Kepada BKK Pati. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2012 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, dan Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Wilayah V Nomor 14/6/kep.kkpWbi/sm/2021. Kemudian pada awal tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang BUMD, Permendagri No 94 tahun 2017 tentang pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah kemudian Perda Provinsi Jawa Tengah No 5 tahun 2018 tentang perusahaan Perseroan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Bentuk Badan Hukum BPR BKK PATI berubah dari PD menjadi PT atau dari PD BPR BKK PATI menjadi PT BPR BKK PATI (Perseroda).

Sesuai dengan Dasar Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/2/ KEP.DpG / 2006 Tanggal 27 Januari 2006 Tentang Pemberian izin penggabungan usaha (merger). Perusahaan ini memiliki 17 kantor cabang yang tersebar di Kecamatan se-Kabupaten Pati yang sudah menggabungkan usaha (*Merger*) dalam Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.

Adapun perusahaan yang melakukan merger diantaranya :

- 1) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Kantor Pusat Operasional
- 2) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Gembong
- 3) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Dukuhseti
- 4) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Wedarijaksa
- 5) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Kayen
- 6) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Jaken
- 7) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Jakenan
- 8) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Pucakwangi
- 9) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Winong
- 10) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Margorejo
- 11) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Cluwak
- 12) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Margoyoso
- 13) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Tlogowungu

- 14) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Sukolilo
- 15) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Juwana
- 16) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Tambakromo
- 17) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Batangan
- 18) PT BPR BKK Pati (Perseroda) Cabang Gabus

PT BPR BKK PATI (Perseroda) merupakan Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melalui penyertaan modal secara langsung dari kekayaan yang dipisahkan. Dalam melakukan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian. Lingkup kerja PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional terutama di wilayah Kecamatan Pati yang merupakan salah satu dari 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Pati. Sebagaimana data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati dalam buku “ KECAMATAN PATI DALAM ANGKA TAHUN 2020”, yang secara ringkas potensi dan kondisi kecamatan Pati sebagai berikut :

Secara administratif Kecamatan Pati terdiri dari 29 Desa, 66 dukuh, 100 rukun warga (RW) dan 570 rukun tetangga (RT). Ke 29 Desa tersebut diantaranya : Panjunan, Gajahmati, Mustokoharjo, Semampir, Patiwetan, Blaru, Pati kidul, Plangitan, Puri, Winong, Ngarus, Patilor, Parenggan, Sidoharjo, Kalidoro, dll.

Jumlah penduduk. Penduduk di Kecamatan Pati pada posisi tahun 2018 diperkirakan sebanyak 108.144 jiwa yang terdiri dari

penduduk laki-laki sebanyak 51.990 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 56.154 jiwa, sumber : (Badan Pusat Statistik ,Kabupaten Pati. 2020).

Profesi. Karakter masyarakat Kecamatan Pati umumnya menyukai tantangan, kreatif, ulet, pekerja keras dan spekulatif. Sedangkan Kecamatan Pati merupakan daerah yang strategis di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) serta sumber daya manusia (SDM). Mengingat potensi ekonominya yang besar, Kecamatan Pati menjadi lahan persaingan banyak lembaga keuangan, diantaranya : Bank Umum, BPR, Koperasi dan Pegadaian.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati (Perseroda) Kantor Pusat Operasional Kabupaten Pati merupakan salah satu kantor cabang dari PT BPR BKK PATI (Perseroda), sedangkan PT BPR BKK PATI (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan komposisi saham sebesar 49% milik pemerintah Kabupaten Pati dan 51% milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dimana tujuan dari pendirian BUMD menurut UU No. 23 tahun 2014, pasal 331 ayat 4 sebagai berikut :

- a) Memberikan manfaat perkembangan ekonomi untuk daerah
- b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan

hajat hidup masyarakat sesuai karakteristik, potensi daerah dengan tata kelola penyelenggaraan perusahaan yang baik

c) Memperoleh laba dan / atau keuntungan.

PT BPR BKK PATI (Perseroda) merupakan lembaga keuangan yang sudah memiliki badan hukum, diawasi langsung oleh OJK dan Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Bank Peserta Penjaminan LPS yang memiliki kriteria simpanan layak bayar (3T), diantaranya :

- 1) Tercatat dalam pembukuan Bank
- 2) Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Misalkan dalam jangka waktu 12 bulan bunga yang ditetapkan sebesar 7% maka bunga harus sama 7% atau dibawah 7% dan tidak boleh melebihi dari 7%
- 3) Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank

Besarnya nilai yang dijamin oleh LPS yaitu Rp2.000.000.000 untuk setiap nasabah / Bank. Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank komersial (atau) pokok ditambah bagi hasil yang sudah menjadi hak nasabah untuk bank syariah. LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah sampai dengan jumlah 2Milyar saja sedangkan jumlah simpanan diatas 2Milyar akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank dan pengawasan langsung oleh Otoritas Jasa

Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK nomor 62/POJK.03/2020.

2.1.2 Bidang Usaha

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh dan efisien. Industri BPR perlu diperkuat agar mampu berkembang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat di wilayah kerjanya, maka usaha pokok dari PT BPR BKK PATI (Perseroda) yaitu :

1) Penghimpunan Dana

Produk-produk yang ditawarkan untuk menghimpun dana nasabah sebagai berikut :

a) Tabungan wajib

Adalah kewajiban untuk setiap debitur yang jumlahnya sudah ditentukan antara 1,5% dari plafond kredit yang didapatkan.

b) Tabungan simpel

Merupakan salah satu program dari pemerintah untuk meningkatkan budaya menabung bagi para pelajar. Simpanan pelajar ini bisa dipakai dari pelajar KB/TK sampai SMA. Adapun persyaratan ataupun kemudahan dari simpel ini adalah minimal memiliki saldo Rp25.000, Limit setoran Rp5.000, Setiap bulan tidak dikenakan biaya administrasi, serta adanya MOU dari pihak sekolah dengan bank BKK.

c) Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES)

Merupakan tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu, setoran untuk pertama kali minimal sebesar Rp50.000, limit setoran Rp25.000, bunga 1,5% setiap tahun. Keuntungan yang bisa diperoleh dari tabungan tamades yaitu proses lebih cepat dan bisa mengikuti undian tamades setiap tahunnya. Sehingga nasabah memiliki peluang untuk membawa pulang hadiah seperti mobil, sepeda motor, dan barang-barang elektronik lainnya

d) Deposito berjangka

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditetapkan, pembukaan rekening deposito untuk pertama kali minimal Rp1.000.000, Lamanya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE.060/DIR/V/2021 tanggal 31 Mei 2021. Besaran tarif bunga deposito tahun 2021 sebagai berikut :

No	Produk	Besaran Tarif Bunga Simpanan
1	Deposito 1 bulan	3,5%
2	Deposito 3 bulan	4,0%
3	Deposito 6 bulan	4,5%
4	Deposito 12 bulan	5,0%

Tabel 2.1

Tarif Bunga Deposito

Ketentuan lain yang harus dimiliki nasabah deposan untuk pembukaan rekening deposito yaitu harus memiliki tabungan tamades, nasabah deposan juga bisa diikutkan dalam gebyar undian tamades dengan saldo tertentu.

2) Penanaman Modal

Dari penghimpunan dana tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit yang terdiri dari :

a) Kredit Usaha Mikro yaitu pinjaman kredit yang diberikan

kepada calon debitur dengan besaran plafond sebesar Rp500.000 s/d Rp100.000.000 dengan sistem angsuran musiman dan bulanan.

1) Jangka waktu : Untuk sistem angsuran musiman maksimal 9 bulan dan sistem angsuran bulanan maksimal 60 bulan.

2) Sistem pembayaran : Untuk sistem angsuran musiman, pokok dibayarkan sesuai dengan jangka waktu kredit yang sudah ditetapkan kemudian untuk bunga bisa diangsur setiap bulan ataupun dibayar dimuka (lalu diamortisasi setiap bulan) dan untuk sistem angsuran bulanan, pokok beserta bunga dibayarkan setiap bulannya selama jangka waktu perjanjian kredit

3) Sektor yang dibiayai yaitu sektor perdagangan, home industri, pertanian dan jasa. Untuk agunan bisa berupa barang bergerak, tidak bergerak dan cash collateral.

b) Kredit Usaha Kecil yaitu pinjaman kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan besaran plafond yang ditawarkan sebesar Rp50.000.000 s/d Rp500.000.000 dengan sistem angsuran musiman dan bulanan.

1) Jangka Waktu : Untuk sistem angsuran musiman maksimal 9 bulan dan sistem angsuran bulanan maksimal 60 bulan

2) Sistem Pembayaran : Untuk sistem angsuran musiman pokok pinjaman dibayar sesuai jangka waktu kredit serta bunga dapat diangsur setiap bulannya ataupun dibayar dimuka (lalu diamortisasi setiap bulan). Kemudian untuk angsuran bulanan pokok dan bunga dibayarkan setiap bulannya.

3) Sektor yang dibiayai yaitu sektor perdagangan, home industri, pertanian dan jasa. Untuk agunan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan cash collateral. Khusus untuk pinjaman diatas Rp100.000.000 agunan harus berupa sertifikat tanah (SHM).

c) Kredit Musiman merupakan pinjaman kredit yang diberikan oleh bank kepada calon debitur yang memiliki usaha dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pembangunan-pembangunan. Besarnya plafon yang ditawarkan mulai dari Rp1.000.000 s/d batas maksimal BMPK bank, saat kredit tersebut dicairkan. Dengan jangka waktu yang diberikan maksimal 9 bulan. Sistem pembayaran untuk pokoknya dibayarkan sesuai jangka waktu kredit dan bunga diangsur setiap bulan atau dibayar dimuka (lalu diamortisasi setiap bulan).

d) Kredit Perdagangan (Umum) yaitu pinjaman kredit yang diberikan kepada calon debitur sektor perdagangan. Besaran plafon yang ditawarkan mulai dari Rp1.000.000 s/d batas maksimal BMPK bank, saat kredit tersebut dicairkan. Suku bunga mulai dari 1% flat. Dengan jangka waktu maksimal selama 60 bulan (5tahun). Sistem pembayaran pokok dan bunga diangsur setiap bulannya selama jangka waktu kredit. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi

yaitu : Fotocopy KTP suami/istri 2 lembar, Fotocopy Kartu Keluarga 2 lembar, Fotocopy Surat Nikah 2 lembar, Copy Agunan untuk Kendaraan : BPKB, STNK & NOTA PAJAK (Diutamakan roda 4 dengan umur ekonomis 5 tahun).
Sertifikat Tanah : copy SHM & SPPT asli tahun terakhir.
Untuk pengajuan 50 juta keatas, melampirkan SIUP & NPWP.

e) Kredit Potong Gaji merupakan pinjaman kredit yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) / POLRI dan atau instansi yang pembayaran gaji melalui mekanisme bendahara Gaji. Serta yang terpenting sudah ada perjanjian kerja sama (MOU) dengan bank. Besarnya plafon kredit yang ditawarkan mulai dari Rp 5.000.000 – Rp 200.000.000 dengan suku bunga flat 10% per tahun / (0,83%) per bulan.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : Fotocopy KTP pemohon beserta suami/istri 3 lembar, Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar, Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), Pas Foto, Slip Gaji bulan terakhir, Mengisi blanko permohonan. Untuk agunan, Apabila plafon lebih kecil dari Rp 50.000.000 agunan dapat berupa Karpeg atau Kartu Taspen (asli) ditambah salah satu SK asli, Apabila plafon kredit > Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 namun tidak dapat menyerahkan SK Capeg, SK Pegawai, SK Terakhir

dan Taspen maka dapat diganti agunan berupa cash collateral, barang bergerak, dan barang tidak bergerak dengan bukti kepemilikan berupa HM (Hak Milik), HGM (Hak Guna Usaha) dan BPKB yang asli

f) Kredit jasa-jasa merupakan pinjaman kredit yang diberikan kepada calon debitur dibidang jasa seperti kontraktor, transportasi, salon, bengkel, dll. Dengan sistem angsuran musiman dan bulanan. Untuk sistem angsuran musiman jangka waktu yang ditawarkan mulai dari 1 sampai dengan 9 bulan serta sistem angsuran bulanan maksimal 36 bulan untuk plafond s/d Rp50.000.000 jika lebih besar dari Rp50.000.000 jangka waktu maksimal 60 bulan.

g) Kredit Cash Collateral yaitu pemberian pinjaman kredit kepada calon nasabah bagi penabung dan deposan dengan tetap mengacu pada batasan-batasan ketentuan yang ada. Besarnya plafond maksimal 80% dari nilai nominatif simpanan. Sistem angsuran bisa bulanan ataupun musiman.

Dengan jangka waktu apabila simpanan itu berupa deposito maka jangka waktu kredit sesuai dengan jangka waktu deposito, jika lebih panjang jangka waktu kredit, depositonya dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu kredit. Dan apabila simpanan itu berupa tabungan, maka jangka waktu kreditnya maksimal 12 bulan dan atau

diterbitkan surat pemblokiran rekening tabungan sesuai dengan jangka waktu kredit tersebut.

h) Kredit Mikro BKK (KMB) merupakan pinjaman kredit dengan plafond kredit yang ditawarkan mulai dari Rp 1.000.000 – Rp 25.000.000 dengan suku bunga sebesar 0,75% per bulan. Keuntungan yang bisa diperoleh dari produk ini meliputi : Suku Bunga Murah, Proses Cepat dan Mudah, Potongan Administrasi Ringan, serta Debitur Dijamin dengan Asuransi.

i) Kredit Multi Guna yaitu Pemberian kredit kepada calon nasabah dan nasabah yang memerlukan pembiayaan atas kebutuhan dan kepentingan seperti biaya renovasi, biaya haji dan umroh, biaya kepemilikan kendaraan dan atau sejenisnya yang membutuhkan pendanaan. Besarnya plafond mulai dari Rp1.000.000 s/d batas maksimal BMPK bank, saat kredit tersebut dicairkan. Sistem angsuran yaitu bulanan dengan jangka waktu maksimal 60 bulan. Agunan berupa sertifikat hak milik (SHM).

2.1.3 VISI DAN MISI

Dalam mencapai tujuan dari perusahaan maka diperlukan visi dan misi yang jelas sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Visi dari PT BPR BKK PATI (Perseroda) adalah “ Memberikan yang terbaik” dengan didukung misi diantaranya :

1. Melakukan perubahan budaya kerja dan melakukan aktivitas operasional secara mandiri.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat menuju kearah pelayanan prima didukung sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional.
3. Mewujudkan kemandirian usaha yang menguntungkan dengan memberikan kesejahteraan yang memadai dan pendapatan asli daerah kepada pemilik.

2.1.4 BUDAYA KERJA

Selain Visi dan Misi tersebut, PT BPR BKK PATI (Perseroda) juga memiliki 8 budaya kerja untuk dipedomani bersama, diantaranya:

- 1) Rukun yaitu saling mengasihi, saling memaafkan, saling memperkuat dan tolong menolong dalam kesatuan
- 2) Kompak yaitu setiap pekerjaan dikerjakan bersama-sama dengan giat, tulus, senang, gembira dan seia sekata
- 3) Kerjasama Yang Baik yaitu dalam bekerja harus saling peduli, saling mendukung dan saling melancarkan
- 4) Jujur yaitu selalu berkata dengan benar, tidak berdusta, Perkataan harus sesuai dengan perbuatan
- 5) Amanah yaitu bisa dipercaya dan tidak berkhianat. Menyampaikan hak kepada yang berhak menerima
- 6) Efektif dan Efisien yaitu bekerja giat, semangat, sukses serta hemat tenaga, waktu dan biaya dengan hasil yang maksimal

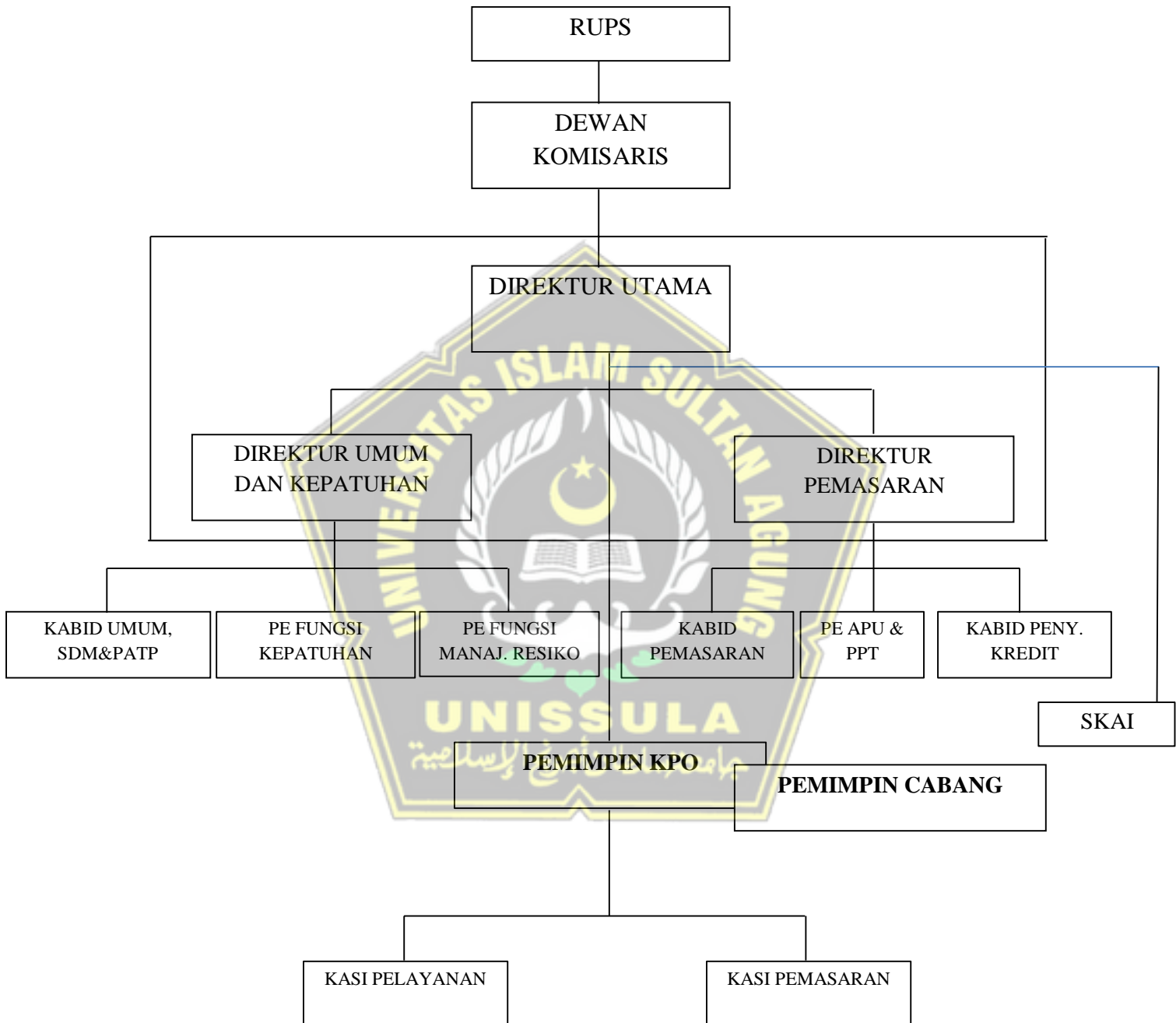
- 7) Disiplin yaitu mematuhi semua aturan yang berlaku serta tunduk dan taat pada nilai yang menjadi tanggung jawabnya.
- 8) Profesional yaitu memiliki kompetensi di bidang perbankan menjunjung tinggi Kode Etik Bankir Indonesia.

2.1.5 Stuktur Organisasi PT BPR BKK PATI (Perseroda)

Rencana struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan yang paling rendah sampai dengan tingkatan pejabat eksekutif. Stuktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun antara lain dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, penerapan manajemen resiko bagi bank perkreditan rakyat, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Dengan adanya struktur organisasi dalam perusahaan akan memudahkan pengawasan oleh pimpinan yang lebih tinggi serta memudahkan pegawai dalam memberikan pertanggung jawaban kepada atasannya. Bagan struktur organisasi ini sesuai dengan peraturan direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati (Perseroda) Kabupaten Pati, Nomor : 064 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati (Perseroda) Kabupaten Pati.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PT BPR BKK PATI (Perseroda)**



Gambar 2.1

Struktur Organisasi

2.1.6 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

a) Tugas pokok Dewan Komisaris adalah :

- 1) Menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh pemegang saham, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap perusahaan.
- 2) Membuat laporan hasil pengawasan setiap semester kepada instansi terkait.
- 3) Melakukan teguran kepada Direksi BPR apabila ternyata dalam menjalankan perusahaan ataupun dalam menerapkan kebijakan tidak sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah :

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan operasional bank serta memberikan nasehat kepada direksi
- 2) Terjaminnya pelaksanaan kegiatan operasional sesuai ketentuan perbankan dan UU yang berlaku
- 3) Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar bank.

Wewenang Dewan Komisaris adalah :

- 1) Membahas Rencana Bisnis Bank (RBB) sebelum disampaikan kepada pemegang saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan

- 2) Meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh direksi
- 3) Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada pemegang saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha
- 4) Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban tahunan direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RBB tahun buku berikutnya
- 5) Memberikan penilaian laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan direksi dalam forum RUPS
- 6) Mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada pemegang saham melalui RUPS
- 7) Mengawasi pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Bank
- 8) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen resiko
- 9) Memastikan penerapan manajemen resiko oleh direksi
- 10) Mengevaluasi pertanggung jawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen resiko

b) Tugas pokok Direktur Utama adalah :

Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang perusahaan

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, Direktur Utama mempunyai Tugas Pokok menyusun perencanaan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bidang, sekretariat, kantor pusat operasional, kantor cabang, seksi / unit pelayanan berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian. Kemudian Direktur Utama diangkat dan diberhentikan sesuai dengan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dengan status karyawan yang diberikan yaitu pegawai tetap dan tidak tetap atau kontrak. Pegawai tidak tetap (kontrak) yang dimaksud adalah pegawai yang nantinya bisa saja diangkat menjadi pegawai tetap tergantung dari kebutuhan perusahaan dan bisa saja kontraknya tidak diperpanjang artinya harus keluar.

Tanggung Jawab Direktur Utama :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai PT BPR BKK PATI (Perseroda) yang efisien dan akuntabel.
- 2) Melaksanakan manajemen PT BPR BKK PATI (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR BKK PATI (Perseroda)

berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris

- 4) Menetapkan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan kepada pemegang saham
- 5) Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar bank
- 6) Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Wewenang Direktur Utama adalah :

- 1) Mengurus dan mengelola kekayaan PT BPRBKK PATI (Perseroda)
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku
- 3) Menetapkan tata tertib perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakili perusahaan
- 5) Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik perusahaan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

c) Tugas pokok Direktur Umum dan Kepatuhan adalah :

Direktur Umum dan Kepatuhan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam bidang kesekretariatan dan perencanaan termasuk di dalamnya pengembangan bidang administrasi, hukum, tata laksana, organisasi, rumah tangga, umum, personalia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap bidang umum, SDM dan Perencanaan, Akuntansi, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Tanggung Jawab Direktur Umum Dan Kepatuhan adalah :

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
- 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi
- 3) Menetapkan system dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan pedoman Internal Bank
- 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan,, system, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank

- 6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7) Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Direktur Umum dan Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
- 8) Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai
- 9) Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan / atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT

Wewenang Direktur Umum dan Kepatuhan adalah :

- 1) Membantu Direktur Utama dalam mengelola dan mengadministrasi kekayaan perusahaan
- 2) Menetapkan tata tertib perusahaan bersama dengan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Mengelola dan menetapkan kebijakan dalam bidang personalia atas persetujuan Direktur Utama

- 4) Mengelola penyusunan pelaporan, penyelenggaraan kegiatan bidang kesekretariatan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat perusahaan
- 5) Pemantauan terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, khususnya di bidang moneter dan perbankan

d) Tugas pokok Direktur Pemasaran adalah :

Direktur Pemasaran mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas bidang pemasaran dan bidang penyelamat kredit, serta melakukan pembinaan, pengendalian terhadap bidang pemasaran dan bidang penyelamatan kredit.

Tanggung jawab Direktur Pemasaran adalah :

- 1) Mengkoordinasikan sumber daya manusia guna mencapai PT BPR BKK PATI (Perseroda) bidang pemasaran dan bidang penyelamatan kredit yang sehat, efisien dan akuntabel
- 2) Melaksanakan manajemen PT BPR BKK PATI (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Komisaris Utama
- 3) Menyusun Laporan Pertanggung jawaban tahunan kepada pemegang saham sesuai dengan bidang pemasaran dan bidang penyelamatan kredit

- 4) Menyusun perencanaan strategis dan perencanaan jangka pendek sesuai dengan bidangnya
- 5) Mengkoordinasikan semua aktivitas bidang pemasaran dan bidang penyelamatan kredit dengan sebaik-baiknya
- 6) Meningkatkan pertumbuhan dan keseimbangan tingkat laba, tingkat kesehatan, rasio kredit bermasalah dan efisiensi pada tingkat optimal
- 7) Melaksanakan pemasaran dan perkreditan perusahaan dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar PT BPR BKK PATI (Perseroda)
- 8) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
- 9) Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai
- 10) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia antara lain komitmen dalam Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil pengawasan Bank Indonesia Terkait dengan penerapan APU dan PPT

- 11) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU Dan PPT
- 12) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Resiko telah beroperasi secara independen.

Wewenang Direktur Pemasaran adalah :

- 1) Mengelola administrasi keuangan perusahaan
- 2) Menetapkan kebijakan dalam administrasi kredit dan dana, pengendalian terhadap bidang pemasaran serta menetapkan kebijakan dalam bidang penyelamatan kredit
- 3) Melaksanakan pengawasan dalam menghimpun dan pengelolaan dana perusahaan serta pengawasan dalam bidang penyelamatan kredit
- 4) Melakukan koordinasi dalam bidang pemasaran, bidang penyelamatan kredit serta semua kegiatan administrasi keuangan perusahaan.

e) Tugas pokok Satuan Kerja Audit Intern adalah :

- 1) Melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen bank

- 2) Mendinamisasi fungsi pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif
- 3) Memeriksa, mengevaluasi dan memastikan telah dijalankannya internal kontrol
- 4) Memeriksa, mengevaluasi dan menilai serta memastikan internal kontrol dalam Accounting kontrol dan administrasi kontrol
- 5) Menjalankan bentuk pemeriksaan bank bidang financial operation manajemen
- 6) Memantau efektifitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh unit kerja khusus dan / atau pegawai yang ditunjuk
- 7) Melakukan penilaian terhadap proses identifikasi dan pelaporan transaksi yang mencurigakan
- 8) Melakukan (on the spot) pemeriksaan langsung ke lapangan terhadap transaksi untuk mendapatkan pencocokan
- 9) Memeriksa dan melaporkan permodalan, KAP, Manajemen umum dan resiko Rentabilitas, Likuiditas, dan Rasio-rasio perbankan lainnya
- 10) Melaporkan temuan-temuan hasil pemeriksaan kepada direksi dan / atau manajemen dengan tepat waktu

Wewenang SKAI adalah :

- 1) Memeriksa setiap transaksi pada seluruh unit kerja

- 2) Memeriksa tugas pelaksanaan operasi pada seluruh unit kerja
- 3) Memeriksa laporan keuangan harian dan bulanan serta laporan eksternal lainnya
- 4) Memberikan pertimbangan atas kebijakan / keputusan yang akan diambil Direksi
- 5) Memberikan pertimbangan atas usulan PH dan penyusunan anggaran

f) Tugas pokok Bidang Umum, SDM dan PATP adalah :

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan bidang kesekretariatan, hukum, organisasi, dan tata laksana serta hubungan masyarakat, dan pengelolaan perlengkapan PT BPR BKK PATI (Perseroda)
- 2) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan pengelolaan personalia dan perlengkapan
- 3) Mengatur dan menjaga hubungan kerjasama yang baik antara bidang yang dipimpinnya dengan bidang yang lainnya, dengan KPO/ Kantor Cabang serta Kantor Pusat
- 4) Melaksanakan, mengkoordinasikan RBB dan perubahannya
- 5) Menyusun rencana operasional PT BPR BKK PATI (Perseroda) baik jangka pendek maupun jangka panjang

- 6) Melakukan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pemasukan, data elektronik, serta melaporkan kebijakan yang berhubungan dengan sistem teknologi informasi
- 7) Menyelesaikan administrasi pembukuan dan administrasi kantor lainnya
- 8) Melaksanakan proses laporan keuangan dan keamanan data pendukung transaksi keuangan

Wewenang Bidang Umum, SDM dan PATP

- 1) Mengusulkan pegawai / karyawan untuk kenaikan grade dan untuk mengikuti pelatihan / pendidikan
 - 2) Mengusulkan mutasi dan promosi karyawan
 - 3) Mengusulkan pengadaan dan penghapusan inventaris perusahaan
 - 4) Memantau kegiatan pelayanan dan pembukuan secara keseluruhan
 - 5) Menilai prestasi kerja karyawan bawahannya
- g) Tugas pokok Bidang Pemasaran adalah :**
- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi penghimpunan dana dan penyalurannya dalam bentuk kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 2) Membiayai golongan usaha mikro, kecil, dan menengah

- 3) Mendekatkan dan membina kepada masyarakat, baik calon nasabah maupun sudah menjadi nasabah
- 4) Menghimpun dana dan mengelola dana dari masyarakat berupa deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan
- 5) Melaksanakan administrasi keuangan, baik dalam menghimpun dana dan penyalurannya.

Wewenang Bidang Pemasaran adalah :

- 1) Mengevaluasi, merekomendasikan kelayakan aplikasi/ permohonan kredit dan hasil analisisnya
- 2) Mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan
- 3) Memelihara profil nasabah
- 4) Melakukan negosiasi dengan calon nasabah sesuai dengan wewenangnya

h) Tugas Bidang Penyelamatan Kredit adalah :

- 1) Melakukan koordinasi kegiatan pengawasan penyaluran kredit
- 2) Melakukan negosiasi dengan calon nasabah yang potensial
- 3) Memonitor angsuran kredit, membuat target penagihan angsuran kredit dan memantau hasilnya
- 4) Menjaga agar portofolio kredit tetap dalam kondisi lancar
- 5) Melaksanakan dan mengevaluasi, menyelesaikan kredit bermasalah

Wewenang Bidang Penyelamatan Kredit adalah :

- 1) Mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan
- 2) Melakukan kunjungan lapangan kepada debitur/calon debitur
- 3) Melakukan koordinasi dengan KPO dan cabang dalam restrukturisasi kredit, pengambil alihan agunan kredit dan hapus buku kredit macet
- 4) Mengusulkan penyelesaian kredit bermasalah secara hukum.

i) Tugas pokok Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Kepatuhan :

- 1) Memantau dan memahami perkembangan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- 2) Mengadakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja BPR mengenai POJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain
- 3) Memastikan masing-masing unit kerja sudah menyesuaikan ketentuan internal terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 4) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja BPR

Wewenang Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Kepatuhan :

- 1) Memantau kegiatan Bank apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

2) Memonitor kebenaran pelaksanaan dan pelaporan

j) Tugas pokok Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Manajemen

Resiko adalah :

- 1) Menyampaikan laporan evaluasi risiko kepada Direksi secara periodik
- 2) Melakukan evaluasi sumber dan penyebab terjadinya risiko, sebagai dasar untuk memetakan dan mengendalikan risiko yang signifikan
- 3) Melaporkan hasil identifikasi, pemantauan dan tindak lanjut pengendalian risiko secara periodik setiap triwulan
- 4) Menjadikan pengelolaan risiko sebagai dasar pemeriksaan (audit berbasis risiko) dan sebagai Key Performance Indicator (KPI) bagi setiap Pimpinan unit kerja

Wewenang Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Manajemen

Resiko adalah :

- 1) Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan komite manajemen risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
- 2) Pengkajian usulan penerbitan produk dan / atau pelaksanaan aktivitas baru
- 3) Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, sesuai kewenangan yang dimiliki.

k) Tugas pokok Pejabat Eksekutif (PE) APU & PPT adalah :

- 1) Memastikan adanya pengembangan identifikasi, klarifikasi, verifikasi nasabah dan transaksi keuangan yang mencurigakan dengan baik dan benar ke seluruh unit-unit kerja di Kantor Pusat Operasional maupun Kantor Cabang yang dimiliki
- 2) Melakukan verifikasi, analisa terhadap laporan transaksi untuk diyakinkan ada tidaknya unsur-unsur yang mencurigakan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Wewenang Pejabat Eksekutif (PE) APU & PPT adalah :

- 1) Pembuatan profil nasabah
- 2) Pengkinian (updating) data nasabah secara periodik
- 3) Mengusulkan adanya pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT secara berkala kepada pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru .

l) Tugas Pemimpin KPO / Kantor Cabang adalah :

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor KPO atau Cabang
- 2) Menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran
- 3) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran
- 4) Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta bank

- 5) Mereview permohonan kredit sebelum merekomendasikan
- 6) Melakukan penilaian secara menyeluruh untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur
- 7) Berpartisipasi memasarkan produk dan jasa bank

Wewenang Pemimpin KPO / Kantor Cabang adalah :

- 1) Membuat laporan yang disampaikan kepada OJK , Bank Indonesia, Direksi, dan pihak berwenang lainnya
- 2) Memantau kegiatan pemasaran produk dan jasa secara keseluruhan
- 3) Menolak, menyetujui dan merekomendasikan aplikasi kredit
- 4) Menilai prestasi kerja karyawan bawahannya

m) Tugas Kasi Pemasaran adalah :

- 1) Memantau perkembangan pemasaran kredit, pemasaran dana, hubungan nasabah, dan melakukan pemberdayaan agar tercapai hasil yang optimal
- 2) Membuat laporan berkala kepada Pimpinan KPO/ Kantor cabang mengenai pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga beserta permasalahan serta usulan-usulan perbaikan
- 3) Melakukan pembinaan terhadap usaha debitur dan kreditur
- 4) Mengatur target pertumbuhan portofolio kredit yang sehat dengan penekanan pada kualitas, profitabilitas dan penetrasi pasar.

Wewenang Kasi Pemasaran adalah :

- 1) Menawarkan produk-produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat / Dinas/ Instansi/ Lembaga
- 2) Melaksanakan akad kredit bagi pemohon kredit yang disetujui
- 3) Mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan
- 4) Menerbitkan surat pelunasan kredit, surat roya dan pelepasan jaminan.

n) Tugas Kasi Pelayanan adalah :

- 1) Mencatat transaksi harian meliputi jurnal, general ledger, mutasi kas harian, saldo nominatif dana pihak ketiga
- 2) Menyusun perputaran kas mingguan
- 3) Menyusun, menerbitkan, dan menyampaikan laporan keuangan secara (harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan)
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) ke OJK
- 5) Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dari kasi pemasaran

Wewenang Kasi Pelayanan adalah :

- 1) Memberikan persetujuan / rekomendasi atas usulan biaya yang diajukan oleh unit kerja

- 2) Memberikan paraf surat menyurat yang terkait dengan bidang pekerjaannya sebelum ditandatangani oleh atasannya.

Dalam kaitannya dengan penyaluran kredit kepada para debitur, PT BPR BKK PATI (Perseroda) tentunya memperhatikan prinsip analisa kredit 5C untuk dapat mempertahankan kinerja perusahaan yang telah dibuktikan dengan nilai NPL tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Pentingnya analisa kredit 5C yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti akan mampu meningkatkan keuntungan (laba) perusahaan. Adanya wabah pandemi covid-19 berdampak ke semua sektor yang ada tentu membuat peran lembaga keuangan sebagai salah satu tujuan masyarakat untuk mempertahankan bisnisnya. Strategi penanganan terhadap pinjaman yang tidak dapat tertagih menjadi permasalahan yang dihadapi.

Pada Laporan Publikasi Triwulan terkait laporan laba rugi per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan total laba dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Serta Laporan Kualitas Aset Produktif per 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa PT BPR BKK PATI (Perseroda) dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan nilai rasio NPL dibawah 5%. Untuk lebih jelasnya penulis juga melampirkan data pendukung lainnya sebagai berikut:



Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Laba Rugi

31 Desember 2020

601507 - PD. BPR BKKPati

JL.PEMUDA NO 296 A PATI

Provinsi Jawa Tengah, Kab. Pati

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

	Posisi Tanggal Laporan Dalam ribuan (Rp)	Posisi yang sama tahun sebelumnya Dalam ribuan (Rp)
POS		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN BUNGA		
a. Bunga Kontraktual	40,351,442	38,708,433
b. Provisi Kredit	3,551,785	3,021,601
c. Biaya Transaksi -/-	0	0
Jumlah Pendapatan Bunga	43,903,227	41,730,035
Pendapatan Lainnya	3,948,458	4,065,175
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	47,851,685	45,795,210
BEBAN BUNGA		
Beban Bunga		
a. Kontraktual	10,652,103	10,915,321
b. Biaya Transaksi	0	0
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	2,753,450	2,444,820
Beban Pemasaran	810,551	911,936
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	22,500
Beban Administrasi dan Umum	25,581,321	23,889,615
Beban Lainnya	356,195	359,680
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	40,153,620	38,543,872
LABA (RUGI) OPERASIONAL	7,698,065	7,251,338

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Non Operasional	108,256	92,224
BEBAN NON OPERASIONAL		
Kerugian Penjualan/Kehilangan	667	0
Lainnya	257,856	365,801
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(150,267)	(273,577)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7,547,798	6,977,761
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	1,559,650	1,643,067
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	5,988,148	5,334,694
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5,988,148	5,334,694

Gambar 2.2

Laporan Laba Rugi Publikasi OJK 2020



Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Kualitas Aset Produktif
31 Desember 2020
601507 - PD. BPR BKK Pati

JL.PEMUDA NO 296 A PATI
 Provinsi Jawa Tengah, Kab. Pati

| UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN |

Ribuan Rp.

	Nominal Dalam Ribuan Rupiah						
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah	
KAP DAN RASIO							
Penempatan pada bank lain	122,777,490			0		0	122,777,490
KREDIT YANG DIBERIKAN							
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank							
± pihak terkait	4,179,737		0	0	0	0	4,179,737
d. Kepada non bank							
± pihak tidak terkait	162,293,096	27,629,391	3,218,351	5,516,588	14,559,957		213,217,383
Jumlah Aset Produktif	289,250,323	27,629,391	3,218,351	5,516,588	14,559,957		340,174,610
RASIO							
± RASIO %							
a. KPMM							26.89
b. KAP							5.97
c. PPAP							100.00
d. NPL (neto)							4.73
e. ROA							2.35
f. BOPO							83.91
g. LDR							64.33
h. Cash Ratio							17.10

Gambar 2.3

Laporan Kualitas Aset Produktif Publikasi OJK 2020

2.2 Aktivitas Magang

Adapun aktivitas selama magang di PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional mulai tanggal 29 Maret 2021 sampai tanggal 15 Juli 2021 akan diuraikan sebagai berikut : Mahasiswa magang diwajibkan mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan seperti hari kerja dan jam kerja. Hari kerja di PT BPR BKK PATI (Perseroda) yaitu hari Senin-Jum'at kemudian jam kerja dari pukul 07.45-15.30 tetapi sejak ditetapkannya PPKM darurat jam kerja hanya sampai pukul 15.00. Berikut aktivitas selama masa magang : setiap pagi hari sebelum melakukan aktivitas bekerja selalu mengikuti doa bersama dan apel pagi bersama dengan pegawai PT BPR BKK PATI (Perseroda) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.



Gambar 2.4

Kegiatan Doa Bersama

Aktivitas selama magang tentunya tidak hanya berada dalam satu bagian atau unit saja melainkan ada beberapa bagian untuk menunjang ilmu

dan pengalaman yang didapatkan selama masa magang. Aktivitas magang penulis selama di bagian customer service meliputi : Belajar mengenal macam-macam slip transaksi beserta fungsinya; Cara pemindah bukuan buku tabungan nasabah; Membuka rekening buku tabungan baru; Mengetahui produk-produk yang ditawarkan di PT BPR BKK PATI (Persero) yang terdiri dari tabungan tamades, tabungan wajib, simpanan pelajar, deposito dan pinjaman kredit; Pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening deposito dan tabungan tamades, pendataan saldo awal simpanan tamades; Belajar cara mencetak buku tabungan; Membantu mencetak buku tabungan tamades nasabah; Mempelajari alur pengambilan deposito seperti pengambilan deposito yang dipindah ke tabungan tamades, pengambilan deposito yang sudah jatuh tempo tetapi hanya diambil sebagian saja dan sisanya dimasukkan ke rekening tabungan; pengambilan deposito tidak jatuh tempo sehingga dikenakan denda (biaya pinalty); Pendataan nasabah baru tabungan tamades dalam pembukuan; belajar terkait syarat-syarat pengambilan tabungan tamades tidak atas nama sendiri dikarenakan pemilik rekening tabungan yang meninggal dunia ataupun yang sedang sakit sehingga tidak bisa mengambalnya sendiri, penutupan rekening tabungan tamades, pendataan penerima voucher kuis Ramadhan 2021; Pengecekan daftar suku bunga deposito yang jatuh tempo pada bulan Mei 2021; Pengisian nomor seri buku tabungan tamades di aplikasi pembukaan tabungan; Belajar terkait LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) PT BPR BKK PATI (Persero); Input data penabung baru tabungan tamades di aplikasi penta; Pengelompokan slip

transaksi nasabah dan perhitungan total penerimaan dan pengeluaran setiap harinya.

Aktivitas magang penulis di bagian fungsi kredit : Mengisi data surat pernyataan kesehatan (JAMKRIDA) nasabah yang mengajukan pinjaman kredit, Konsultasi terkait dengan penggolongan kualitas nasabah (lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar dan macet) serta perhitungan NPL NETTO; Pembuatan denah lokasi rumah dan tanah nasabah kredit di ms word.

Aktivitas magang penulis di bagian Kasi Pelayanan :Mengagenda surat masuk dan keluar; Pendataan data kerjasama (MOU) PT BPR BKK PATI (Perseroda) dengan beberapa instansi; Mencetak bukti penerimaan umum dari kantor cabang; Pengecekan saldo kredit buku besar pembantu laporan transaksi; Pengecekan daftar penempatan pada bank lain dengan Neraca per 30 April 2021; Mencetak transaksi transfer dari kantor cabang, Merekap slip transaksi, Pembuatan surat kuasa untuk salah satu pegawai PT BPR BKK PATI (Perseroda); Pembuatan label nama penerima bingkisan hari raya untuk penabung, deposan dan lembaga MOU; Perhitungan total PPh 21 pegawai; Pembuatan/pencatatan pembukuan buku besar pembantu piutang bulan Februari-April 2021; Mencetak bukti transfer angsuran kredit dari kantor cabang; Pembuatan slip pemindah bukuan perihal angsuran kredit dari kantor cabang.

Aktivitas magang penulis di bagian Fungsi TI/Akuntansi : Membantu mengisi surat pernyataan lembur; Pengisian slip pengeluaran umum perihal

AKA/AKP untuk kantor cabang; Melengkapi data surat perintah lembur bulan April 2021; Pembuatan surat perintah lembur untuk pegawai.

Aktivitas Magang penulis di bagian Fungsi Dana : ikut ke lapangan untuk pengambilan angsuran dan tabungan nasabah bersama pegawai bagian pemasaran; Pengisian saldo akhir perkembangan simpel bulan Mei; Pembuatan laporan perkembangan penyelenggaraan simpel kantor pusat operasional; Input laporan perkembangan simpel/simpel Bi.

Aktivitas magang penulis di bagian umum : Membuat laporan pelunasan PBB-P2 pegawai PT BPR BKK PATI (Perseroda) Pati.

Aktivitas magang lainnya seperti membantu pegawai dilain unit atau bagian yang membutuhkan bantuan, kemudian melakukan pembimbingan kepada dosen supervisor secara langsung di tempat magang. Selama lebih dari 3,5 bulan magang di PT BPR BKK PATI (Perseroda) KANTOR PUSAT OPERASIONAL tentunya penulis banyak mendapatkan ilmu, pengalaman berada di dunia kerja yang sesungguhnya, serta menambah relasi dengan para direksi dan seluruh pegawai. Hingga pada akhirnya tepat tanggal 15 Juli 2021 penulis selesai melaksanakan tugas magang perusahaan dan memberikan sedikit kenang-kenangan sebagai tanda perpisahan.



Gambar 2.5
Pemberian Kenang-Kenangan



Gambar 2.6
Perpisahan

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Otoritas Jasa Keuangan 2016). Dalam menghadapi persaingan antar lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Pati khususnya. Tentunya setiap perusahaan mempunyai strateginya masing-masing. Namun, dalam proses operasionalnya tentunya muncul masalah-masalah intern perusahaan. Masalah-masalah tersebut tentunya tersebar di berbagai bagian atau unit, diantaranya seperti beberapa pegawai yang tidak hadir tepat waktu, jam istirahat tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, belum adanya pemanfaatan teknologi dalam proses operasionalnya seperti *E-Banking* dan fasilitas kartu ATM, kemudian terkait penanganan kredit bermasalah untuk memperkecil tingkat NPL.

Permasalahan sumber daya manusia adalah permasalahan yang sangat penting. Pemberdayaan sumber daya manusia yang maksimal dapat memungkinkan suatu perusahaan mampu bersaing dalam proses operasionalnya. Dalam setiap perusahaan, pegawai mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga setiap pegawai dituntut bekerja dengan maksimal untuk menjadi pegawai yang berkualitas serta profesional. Penyebab dari permasalahan terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor

Pusat Operasional yaitu kurangnya disiplin kerja dari beberapa pegawai seperti pegawai yang tidak hadir tepat waktu dan jam istirahat tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan pengamatan penulis selama masa magang munculnya masalah tersebut karena belum adanya sanksi tegas yang diberikan pada pegawai yang tidak disiplin kerja dan saat apel pagi pun masih mengizinkan pegawai yang terlambat untuk langsung bergabung ke barisan, hal tersebut seharusnya tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Keberadaan disiplin kerja menjadi penting sebab dalam suasana kerja yang penuh dengan kedisiplinan akan lebih mudah dalam melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan. Kemudian permasalahan terkait pemanfaatan teknologi yang belum optimal, hal ini disebabkan karena dalam menerapkan sistem teknologi dibutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar serta persetujuan dari para pemegang saham, selain alasan tersebut bahwa tugas dari bank daerah lebih sempit dibandingkan dengan bank umum lainnya.

Selanjutnya terkait dengan penanganan kredit bermasalah (NPL) yang ada di PT BPR BKK PATI (Perseroda). Bahwa Berdasarkan hasil data yang diperoleh terkait Rekapitulasi Nominatif (Tunggakan) Kredit dan NPL Netto Sampai Tanggal 31 Mei 2021 didapatkan hasil sebagai berikut :

Kolektibilitas	L	DPK	KL	D	M	%B.DB	% NET	KET
Jumlah	529	10	11	5	22	5,19	3,45	CS

Sumber : PT BPR BKK PATI (Perseroda) KPO, 2021

Tabel 3.1

Rekap Nominatif (Tunggakan) Kredit dan NPL Netto

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah nasabah dalam kategori lancar ada 529 nasabah, untuk kategori dalam pengawasan khusus berjumlah 10 nasabah, selanjutnya untuk kategori kurang lancar ada 11 nasabah, kemudian kategori diragukan sebanyak 5 orang, untuk kategori macet berjumlah 22 nasabah. Sehingga nilai NPL dari PT BPR BKK PATI (Perseroda) sampai tanggal 31 Mei 2021 sebesar 5,19% yang menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat kesehatan yang cukup sehat. Untuk dapat menekan nilai NPL tersebut maka dibutuhkan langkah-langkah yang lebih intensif dengan sangat hati-hati. Sehingga permasalahan terkait penanganan NPL ini sangat penting untuk dilakukan. Analisis yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko tingginya NPL dalam pemberian kredit yaitu dengan analisa kredit 5C dengan hati-hati dan sangat teliti. Analisa kredit tersebut antara lain :

- a) Character : Dari SLIK KTP, informasi rekan, tetangga, saudara yang bisa dipercaya
- b) Capacity : Kemampuan nasabah dalam membayar, melalui pendapatan, omzet, HPP, biaya produksi, biaya lainnya, serta laba bersih. Dibuktikan dengan Fotocopy bukti transaksi, pembukuan, nota-nota, kwitansi, dan lain-lain
- c) Capital : Modal yang dimiliki/ jumlah aset/jumlah kekayaan yang dimiliki
- d) Collateral : Agunan yang dijadikan jaminan

- e) Condition of economic : Kondisi ekonomi sekarang terhadap bisnis/ usaha yang dijalankan apakah mempunyai prospek atau berdampak buruk.

Suatu kredit dikatakan bermasalah apabila didasarkan pada kolektibilitas kreditnya tinggi. Kolektibilitas merupakan pembayaran pokok atau angsuran beserta bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Dalam menangani setiap permasalahan kredit yang muncul tentunya ada penanganan- penanganan berbeda yang dilakukan. Penanganan tersebut dapat dilihat berdasarkan kolektibilitas dari debitur melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Untuk menekan tingginya tingkat NPL. Penanganan secara intensif dilakukan dengan melihat kolektibilitas dari para debitur. Dari kolektibilitas yang ada, terdapat 3 kolektibilitas yang sangat mempengaruhi tingginya tingkat NPL yaitu kolektibilitas 3 sampai 5. Sehingga apabila ada calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit lagi, pihak bank dapat melihat kolektibilitas dari debitur. Apabila nilai kolektibilitasnya rendah yaitu 1 – 2, maka debitur bisa mengajukan permohonan kredit kembali dengan cepat dan mudah. Oleh sebab itu, supaya nilai kolektibilitas debitur tidak tinggi diperlukan adanya penanganan yang lebih intensif lagi. Untuk menekan angka kolektibilitas yang tinggi, harus ada penanganan dari setiap tingkat kolektibilitas. Dengan adanya tingkatan penanganan kredit bermasalah (NPL) akan mempermudah atau menekan tingginya tingkat NPL di PT BPR BKK PATI (Perseroda) Pati.

Pada dasarnya permasalahan yang di hadapi dunia perbankan terkait kredit bermasalah selama ini belum menemui hasil yang benar-benar selesai. Oleh karena

itu penulis ingin mengkaji kembali penanganan kredit bermasalah (NPL) pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) kantor pusat operasional. Penanganan Kredit Bermasalah (NPL) yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) sudah sesuai dengan teori. Bank sudah menerapkan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (NPL) menggunakan metode *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring*, hapus buku, pengambilalihan jaminan serta hapus tagih. PT BPR BKK PATI (Perseroda) telah menyusun metode tersebut kedalam prosedur khusus yaitu dengan menetapkan 4 kategori penanganan kredit bermasalah meliputi kategori 2 (*collect 2*), kategori 3 (*collect 3*), kategori 4 (*collect 4*), dan kategori 5 (*collect 5*).

Penggolongan tingkat kategori tersebut berdasarkan pada tunggakan pembayaran kredit. Kategori 2 terdapat tunggakan lebih dari 30 hari dengan penanganan *reschedulling*. Kategori 3 terdapat tunggakan lebih dari 90 hari dengan penanganan *reschedulling dan reconditioning*. Kategori 4 terdapat tunggakan lebih dari 180 hari dengan penanganan *reschedulling, reconditioning, dan restructuring*. Kategori 5 terdapat tunggakan yang lebih dari 360 hari dengan penanganan hapus buku, pengambilalihan jaminan dan hapus tagih.

Penetapan kategori tersebut bisa memudahkan dalam penanganan kredit bermasalah (NPL) karena sudah disusun dalam langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit berdasarkan pada waktu tunggakan pembayaran. Oleh karena itu, akan memberikan memudahkan pihak bank dalam penanganan kredit bermasalah secara langsung.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Pengertian BPR

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit, Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam kegiatan di perbankan, Kredit atau Pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari kegiatan pembiayaan atau kredit, dalam perbankan syariah disebut bagi hasil.

4.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

4.2.1 Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Penyaluran kredit kepada masyarakat (debitur) tidak semuanya dapat tersalurkan dengan baik dikarenakan biasanya terdapat hambatan-hambatan dalam hal pengembalian pinjaman kreditnya kepada bank sehingga bank mengalami kredit bermasalah. Adapun alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kredit bermasalah adalah dengan rasio keuangan yaitu *Non Performing Loan* (NPL). NPL yaitu rasio kredit bermasalah terhadap total kredit.

4.2.2 Analisa Kredit

Analisa kredit merupakan penjabaran secara tertulis pedoman dalam pemberian fasilitas kredit kepada nasabah. Dengan didukung data-data yang memadai seperti kemampuan membayar nasabah, daftar penetapan agunan, dan lain-lain. Analisis kredit minimal harus memuat 5 prinsip kredit antara lain :

1) Character

Yang dimaksud character dalam kepentingan kredit yaitu sifat atau watak dari calon debitur. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari calon debitur yang dimaksud dapat dipercaya. Contohnya seperti bertanya kepada tetangga, saudara, tokoh masyarakat setempat ataupun akses lewat Sistem Layanan Informasi Keuangan calon debitur, sehingga bisa mendapatkan data yang akurat terkait karakter calon debitur.

2) Capacity

Untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membayar kreditnya dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnisnya untuk memperoleh laba, sehingga akan terlihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang akan diterimanya. Semakin baik dalam mengelola bisnisnya maka akan semakin besar pendapatan usahanya dan akan semakin besar pula laba yang diperoleh. Guna keperluan analisis kredit pihak bank dapat meminta bukti-bukti atau fotocopy transaksi keuangan berupa nota-nota, kwitansi, buku laporan transaksi dari calon debitur.

3) Capital

Capital adalah jumlah modal yang dimiliki debitur terkait aset tidak bergerak maupun bergerak yang dapat segera diuangkan untuk mendukung kelangsungan kredit debitur.

4) Collateral

Collateral merupakan agunan yang diberikan calon debitur, dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak atau cash collateral, nilai agunan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan, harus benar-benar diteliti keabsahannya, penguasaan dokumennya, penguasaan fisiknya, kemudahan untuk dilikuidasi dan hal lain secara cermat. Karena jaminan merupakan pelindung arah jalan keluar bagi bank dari resiko kredit. Agunan dari awal proses pengajuan kredit harus sudah diserahkan kepada bank untuk diteliti oleh bagian kredit atau pemasaran, dan pihak bank berhak menolak tanpa alasan apabila diketahui indikasi palsu dari agunan yang dipakai sebagai agunan kredit.

5) Condition of Economy

Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi di masa mendatang sesuai sektor atau sub sektor usaha masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil pemberian kredit untuk sektor tertentu sebaiknya dikurangi sampai dengan perekonomian membaik.

4.2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Pemberian kredit kepada para nasabah tanpa melalui proses analisis dapat menimbulkan resiko cukup besar bagi bank. Dalam hal ini nasabah tentu dapat dengan mudah memberikan data yang fiktif sehingga pengajuan kredit menjadi tidak layak diberikan. Dikarenakan hal itu akan menimbulkan permasalahan saat

penagihan nantinya dan akan terjadi kredit macet. Untuk menghindarinya perlu dilakukan analisis pemberian kredit dalam rangka meminimalisir resiko, Menurut (Susanti 2019) prosedur pemberian kredit sebagai berikut :

- 1) Pengajuan berkas-berkas
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman
- 3) Wawancara I
- 4) On the spot
- 5) Wawancara II
- 6) Keputusan Kredit
- 7) Penandatanganan akad kredit / perjanjian
- 8) Realisasi Kredit
- 9) Penyaluran / penarikan dana

4.2.4 Pengertian Kredit Bermasalah

Dalam pemberian kredit tentunya terdapat berbagai resiko termasuk terjadinya kredit yang menyebabkan timbulnya kesenjangan pada proses kegiatan bank yang bersangkutan, kredit bermasalah ini terjadi karena adanya kredit yang tidak tertagih sehingga menimbulkan kerugian terhadap bank. Menurut (Ambarsita et al. 2013) Kredit Bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. NPL merupakan rasio antara kredit yang bermasalah dengan total

kredit yang disalurkan (Fianto, Maulida, and Laila 2019). Rasio kredit bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit kepada pihak ketiga bukan bank. Yang dimaksud dengan “jumlah kredit bermasalah” adalah jumlah dari kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet kepada pihak ketiga bukan bank.

4.2.5 Penyebab Kredit Bermasalah

Terjadinya Kredit Bermasalah Menggambarkan bahwa terjadi kegagalan dalam menangani resiko yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh Bank. Kredit Bermasalah akan berdampak buruk jika tidak ditangani dengan sangat baik, karena kredit adalah salah satu kegiatan utama bank untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu, untuk menangani kredit bermasalah pihak bank harus mengetahui penyebab utama dari kredit bermasalah. Adapun beberapa faktor penyebab munculnya kredit bermasalah menurut Rivai, 2013 yaitu :

- 1) Kesalahan dari pihak bank yang kurang teliti dalam pengecekan tentang latar belakang calon nasabah, kurang tajam saat melakukan analisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber-sumber pembayaran kembali, tidak ada pemahaman tentang kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah. Tidak adanya ketelitian dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.

- 2) Faktor eksternal seperti perubahan financial dan ekonomi yang menimbulkan pengaruh merugikan debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola perusahaan. Sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

4.2.6 Ukuran Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas dalam Bank Perkreditan Rakyat dikelompokkan menjadi 5 golongan, yaitu : Lancar, Dalam Pengawasan Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Dengan kriteria kemampuan membayar sesuai ketepatan pembayaran pokok dan / atau bunga menurut ketentuan (Otoritas Jasa Keuangan 2018) Nomor 33 / POJK.03/ 2018 sebagai berikut :

- a) Kredit dengan angsuran 1 (satu) bulan atau lebih, dengan kriteria :
- Lancar , apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga atau terdapat tunggakan tidak lebih dari 30 hari
 - Dalam Pengawasan Khusus, apabila terdapat tunggakan lebih dari 30 hari tetapi tidak lebih dari 90 hari, atau kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 hari
 - Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan lebih dari 90 hari tetapi tidak lebih dari 180 hari, atau kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 hari tetapi tidak lebih dari 30 hari

- Diragukan, apabila terdapat tunggakan lebih dari 180 hari tetapi tidak lebih dari 360 hari, atau kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 hari tetapi tidak lebih dari 60 hari
- Macet, apabila terdapat tunggakan lebih dari 360 hari, atau kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 hari; Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; atau kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

b) Kredit dengan angsuran kurang dari 1 (satu) bulan, dengan kriteria:

- Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga, atau terdapat tunggakan tidak lebih dari 15 hari
- Dalam Pengawasan Khusus, apabila terdapat tunggakan lebih dari 15 hari tetapi tidak lebih dari 30 hari, atau kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 hari
- Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan lebih dari 30 hari tetapi tidak lebih dari 90 hari, atau kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 hari tetapi tidak lebih dari 30 hari
- Diragukan, apabila terdapat tunggakan tunggakan lebih dari 90 hari tetapi tidak lebih dari 180 hari, atau kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 hari tetapi tidak lebih dari 60 hari

- Macet, apabila terdapat tunggakan lebih dari 180 hari, atau kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 hari; Kredit telah diserahkan kepada DJKN; atau kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

4.2.7 Penanganan Kredit Bermasalah

Strategi penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak memiliki prospek setelah adanya pembinaan, penyelamatan dan cara lain tidak memungkinkan lagi untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara kreditur dan debitur. Menurut (Putri, Nuraina, and Yusdita 2020), menjelaskan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani kredit macet sebagai berikut :

- a) Resheduling (Penjadwalan Kembali)
- b) Reconditioning (Persyaratan Kembali)
- c) Restructuring (Penataan Kembali) Liquidation

Strategi penyelesaian kredit bermasalah menurut (Kasmir) dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

- 1) Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Penjadwalan kembali merupakan upaya penyelesaian dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit. Dapat dilakukan dengan cara :

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

2) Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit. Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Kapitalisasi Bunga
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c) Penurunan suku bunga
- d) Pembebasan bunga

3) Restructuring (Penataan Kembali)

Yaitu mengubah seluruh persyaratan pembiayaan berupa penambahan dana fasilitas pembiayaan. Dapat dilakukan dengan cara seperti : Menambahkan jumlah kredit dan menambahkan modal dengan menyetorkan uang tunai atau tambahan modal dari pemilik.

4) Kombinasi

Dengan menggunakan ketiga jenis penyelesaian seperti yang sudah dijelaskan diatas.

5) Penyitaan barang jaminan

Penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar atau melunasi semua hutangnya.

4.3 Tinjauan Tentang Kredit Dalam Perspektif Islam

4.3.1 Dasar Hukum Islam Tentang Kredit atau Pembiayaan

Dalam perspektif Islam, Kredit atau pembiayaan telah diatur dalam surah-surah di Al-Qur'an sebagai berikut :

1) Surat Al-Baqarah Ayat 275

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.

2) Surat AL-Baqarah ayat 282

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis

dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3) Surat Al-Baqarah ayat 283

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

4.4 Restrukturisasi Kredit

4.4.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Dalam peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan PPAP Bank Perkreditan Rakyat menjelaskan bahwa Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi

kewajibannya. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu cara yang digunakan bank untuk memberikan keringanan pinjaman kredit supaya dapat kembali lancar.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 penilaian Kualitas Aset Bank Umum sesuai pasal 1 menyatakan bahwa Restrukturisasi Kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Namun Restrukturisasi ini dilarang untuk dilakukan dengan tujuan tertentu yang dapat merugikan kreditur, misalnya untuk mengulur waktu pengembalian kredit atau untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit.

4.4.2 Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Kredit

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi kredit merupakan langkah-langkah untuk mengupayakan supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya pada bank melalui pemberian kelonggaran tertentu, seperti :

- 1) Penurunan suku bunga kredit
- 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit
- 4) Perpanjangan jangka waktu kredit
- 5) Penambahan fasilitas kredit

- 6) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 7) Konversi kredit melalui penyertaan modal sementara pada usaha/perusahaan debitur.

4.4.3 Alasan Restrukturisasi Kredit

Kegiatan Restrukturisasi Kredit berguna untuk membuat suatu kredit yang tergolong tidak lancar menjadi kembali lancar. Supaya mampu menciptakan keadaan yang baik antara kreditur dan debitur, untuk itu alasan bank melakukan restrukturisasi kredit antara lain :

- 1) Debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit dan debitur masih cooperative dengan bank, yaitu memiliki itikad baik dan kredibilitas tinggi serta mempunyai sikap positif dalam membayar kewajibannya.
- 2) Debitur tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit tetapi usaha debitur masih berjalan dan hanya dapat melakukan pembayaran setengah dari kewajibannya, sehingga dapat dilakukan restrukturisasi kredit.
- 3) Bank tidak dapat menarik seluruh seluruh dana yang diberikan kepada debitur melalui eksekusi dari jaminan fasilitas kredit.

4.5 Motivasi Kerja

4.5.1 Pengertian Motivasi Kerja

Motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan (samsudin. 2010). Motivasi mengacu pada jumlah kekuatan yang menghasilkan, mengarahkan serta mempertahankan usaha dalam perilaku tertentu. (Menurut Indi dan handoyo,2013) Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Motivasi merupakan kebutuhan yang dibutuhkan seseorang untuk meningkatkan kinerja (Asmawiyah,A.,Mukhtar,A.,Nurjaya,N. 2020). Menurut (Aldi and Susanti 2019) berpendapat bahwa motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan kepada para pegawai sehingga mereka bersedia bekerja tanpa ada paksaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang mampu membuat seorang pegawai mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Motivasi kerja diperlukan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan semangat kerja dengan tujuan akhir yaitu pencapaian kinerja.

4.5.2 Tujuan Motivasi Kerja

Menurut (Sunyoto, 2015:199) tujuan dari pemberian motivasi antara lain mendorong gairah dan semangat kerja karyawan,

meningkatkan moral serta kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja, mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan partisipasi pegawai, meningkatkan kesejahteraan dan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugasnya.

4.5.3 Teknik Motivasi Kerja

Menurut (Rismayadi and Maemunah 2016) mengemukakan bahwa terdapat dua teknik memotivasi kerja pegawai, antara lain :

- 1) Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai, yaitu bahwa pemenuhan kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku kerja.
- 2) Teknik komunikasi persuasif merupakan salah satu teknik memotivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pegawai secara ekstra logis. Yang dirumuskan dengan istilah “AIDDAS” yaitu Attention (perhatian), interest (minat), desire (hasrat), decision (keputusan), action (tindakan) serta satisfaction (kepuasan).

4.6 Teknologi Informasi

4.6.1 Pengertian Teknologi

Menurut (George dan Jones, 2002:554) teknologi organisasi merupakan kombinasi dari sumber daya manusia (keahlian, kemampuan, pengetahuan dan teknik) dengan bahan dasar dan

peralatan (mesin, komputer dan peralatan lain) yang digunakan oleh para pegawai untuk mengkonversi bahan dasar tersebut menjadi barang jadi serta jasa. Menurut (Robbins, 1994:219) bahwa teknologi merujuk pada proses dan metode yang mengubah masukan menjadi keluaran dalam sebuah perusahaan. Sehingga setiap pekerjaan ataupun fungsi-fungsi organisasi merupakan bagian dari teknologi dalam organisasi, termasuk juga sistem informasi dan pemanfaatan teknologi komputer. Dalam teori-teori organisasi yang membahas mengenai teknologi, pemahaman tersebut merujuk pada tiga kontributor utama yaitu Joan Woodward, Charles Perrow dan James Thompson. Salah satunya yaitu Woodward yang mengajukan tiga jenis teknologi produksi meliputi : unit, massa serta proses. Kontribusi utamanya terdapat pada identifikasi hubungan antara kelas-kelas teknologi serta struktur selanjutnya dari perusahaan yang menunjukkan keefektifan antara organisasi dan struktur. Menurut (Kusumawardhani and Muanas 2020) pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen serta proses kerja secara elektronik. Dan pemanfaatan kemajuan teknologi supaya pelayanan publik bisa diakses dengan mudah serta murah oleh seluruh masyarakat.

4.6.2 Manfaat Teknologi

Manfaat penggunaan teknologi dalam untuk meningkatkan kinerja pegawai antara lain :

- a) Dengan mudah dan cepat penerapan teknologi mampu meningkatkan kecepatan dalam merespon sesuatu serta sistem kerja pegawai dapat terintegrasi
- b) Dapat memudahkan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pegawai
- c) Waktu untuk mengerjakan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi, sebab dapat mengefisiensi waktu yang tadinya selesai dalam kurun waktu satu minggu dengan teknologi hanya butuh waktu 1-2 hari.

4.6.3 Tipe-tipe Teknologi

Menurut James D. Thompson yang memperlihatkan bahwa saling ketergantungan yang diciptakan oleh adanya teknologi penting dalam menentukan struktur organisasi. Dalam pandangannya, Thompson mengajukan tiga jenis teknologi yang memiliki saling ketergantungan yang berbeda. Ketiga jenis teknologi tersebut antara lain :

- 1) Teknologi *mediating* yaitu teknologi yang berdasarkan pada sekelompok tugas yang saling bergantung satu sama lain di mana setiap pegawai dan fungsinya bekerja secara sendiri-sendiri dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Saat perusahaan menerapkan jenis teknologi *mediating* maka hubungan antara tugas dan peran secara jelas teridentifikasi.

Contohnya seperti Bank, Bank merupakan organisasi yang tepat untuk menggunakan jenis teknologi ini.

2) Teknologi *long-linked* yaitu teknologi yang berdasarkan pada urutan dari serangkaian tugas saling bergantung satu sama lain di mana setiap pegawai atau fungsi menghasilkan sebagian pekerjaan menjadi input bagi fungsi lainnya, demikian untuk seterusnya sampai pekerjaan selesai. Perusahaan yang melakukan produksi massa sangat sesuai untuk menggunakan teknologi jenis ini.

3) Teknologi *intensive* yaitu teknologi yang digunakan berdasarkan pada saling ketergantungan tugas serta saling timbal balik, dimana setiap pegawai atau suatu fungsi bekerja secara bersama-sama dan fleksibel serta tidak satupun hasil dari fungsi menjadi input bagi fungsi yang lain. Penggunaan jenis teknologi ini menandakan bahwa beraneka ragam pekerjaan yang harus diselesaikan oleh perusahaan sebab perlu adanya tingkat integritas tinggi dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan yang tepat untuk menggunakan teknologi jenis ini adalah tipe perusahaan organik.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Permasalahan pada PT BPR BKK PATI (Perseroda)

Dalam dunia perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan kredit memiliki peran penting sebagai roda penggerak perekonomian secara keseluruhan. Salah satu lembaga keuangan yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran yang cukup penting dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Dalam menghadapi berbagai persaingan tentunya setiap BPR memiliki strategi masing-masing untuk mempertahankan bisnisnya. Namun, dalam proses operasionalnya tentu ada beberapa masalah baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Adapun permasalahan pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) berdasarkan hasil pengamatan penulis selama masa magang meliputi permasalahan terkait dengan SDM seperti : Beberapa pegawai yang tidak hadir tepat waktu serta jam istirahat tidak sesuai waktu yang ditetapkan.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap SDM yaitu faktor disiplin kerja. Untuk kepentingan perusahaan adanya disiplin kerja dapat menjamin terpeliharanya kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehingga target perusahaan akan tercapai dengan hasil yang optimal. Bagi karyawan sendiri dengan disiplin kerja akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat menambah semangat kerja karyawan. PT BPR BKK PATI (Perseroda) sudah menetapkan peraturan untuk

meningkatkan disiplin kerja yaitu melaksanakan standar kerja dengan baik, memakai pakaian sesuai dengan aturan yang ditetapkan, jam kerja pada pukul 07.30-15.00 WIB dengan waktu istirahat selama 1 jam dari pukul 12.00-13.00 WIB. Dari daftar absensi karyawan PT BPR BKK PATI (Perseroda) perusahaan dapat mengetahui kedisiplinan dari SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bagi karyawan yang kurang disiplin akan mendapatkan *punishment* berupa sanksi. Sanksi yang diberikan meliputi sanksi ringan, sedang dan berat. Untuk meningkatkan disiplin kerja para karyawan PT BPR BKK PATI (Perseroda) maka pemberian motivasi karyawan harus lebih ditingkatkan lagi serta pemberian reward bagi karyawan yang memiliki disiplin kerja tinggi.

Permasalahan berikutnya adalah belum adanya pemanfaatan teknologi dalam proses operasionalnya seperti E-Banking dan fasilitas kartu ATM. Di era digital saat ini pemanfaatan IPTEK bagi sebuah perusahaan merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan begitu perusahaan dapat mempertahankan bisnisnya di tengah banyaknya perusahaan serupa. Apalagi untuk perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Teknologi dapat memudahkan dan memberikan efisiensi waktu bagi kreditur dan debitur. PT BPR BKK PATI (Perseroda) menjadi salah satu lembaga keuangan daerah yang bisa mencoba untuk membuat suatu aplikasi seperti *E-Banking* dengan fitur-fitur sederhana yang dapat dipahami oleh semua kalangan nasabah. Sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan transaksi yang sudah disediakan pada *E-Banking*.

Selanjutnya permasalahan terkait Penanganan kredit bermasalah untuk memperkecil tingkat NPL. Dari beberapa permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, menurut penulis permasalahan terkait penanganan kredit bermasalah untuk memperkecil tingkat NPL sangat penting untuk dilakukan. Kredit sebagai aktiva terbesar dalam komposisi neraca di lembaga keuangan (bank) merupakan bagian dari aktiva produktif sebagai sumber penghasilan utama bank, sehingga harus dijaga kualitas kreditnya supaya tidak bermasalah bahkan macet. Pengertian kredit bermasalah menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:4760) adalah suatu kejadian dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kreditnya. Demikian juga pengertian kredit bermasalah menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:91) yaitu kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos bank yang menjadi beban debitur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah merupakan suatu kejadian ketika debitur tidak mampu melunasi pinjaman dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Kegiatan kredit tentunya sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, kebutuhan akan dana dalam memenuhi kebutuhan, sehingga keinginan untuk memperolehnya biasa dikenal dengan kredit. Menurunnya kegiatan ekonomi, perubahan suku bunga, inflasi menyebabkan bank selektif untuk mengatasi lonjakan Non Performing Loan (NPL). NPL

merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis. NPL mencerminkan juga risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Diyanti dan Widyarti, 2012). Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kreditnya. Kredit Bermasalah (NPL) merupakan kredit yang masuk dalam kategori kredit kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan kriteria OJK Pasal 33. Akibat yang ditimbulkan dari adanya kredit bermasalah ini adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari kredit yang diberikan serta bank harus mengurangi pendapatan untuk Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sehingga mengurangi perolehan laba. Munculnya wabah pandemi covid-19 yang belum dapat diketahui kapan hilangnya juga dapat memicu tingginya rasio NPL. Sehingga membuat lembaga keuangan untuk terus menyusun strategi supaya nilai rasio NPL tidak semakin tinggi..

PT BPR BKK PATI (Perseroda) menjadi salah satu lembaga keuangan daerah di Kabupaten Pati yang sudah memiliki 17 kantor cabang yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pati. Strategi dalam menekan tingginya tingkat NPL sangat diperhatikan. Untuk melihat kredit produktif dan seberapa jauh kredit bermasalah pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) yang dinilai berdasarkan kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas kredit PT BPR BKK PATI (Perseroda) tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Kolektibilitas Kredit PT BPR BKK PATI (Perseroda)

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Jenis Kredit	2018	%	2019	%	2020	%
1	Lancar	261.514	94,73	273.687	88,05	289.250	85,03
2	Dalam Pengawasan Khusus	0	0	18.788	6,04	27.629	8,12
3	Kurang Lancar	813	0,29	2.314	0,74	3.218	0,94
4	Diragukan	1.787	0,64	4.119	1,32	5.516	1,62
5	Macet	11.922	4,31	11.892	3,82	14.559	4,27
	Jumlah	276.036	100	310.800	100	340.172	100
	NPL		5,52		5,47		4,73
	Tingkat kesehatan		CS		CS		S

Sumber: Data yang sudah diolah, 2021

Dari tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa tingkat kolektibilitas nasabah cenderung fluktuasi. Pada tahun 2018 tingkatan NPL yaitu sebesar 5,52% dengan kredit lancarnya sebesar 94,73%, kredit kurang lancar sebesar 0,29%, kredit diragukan sebesar 0,64%, kredit macet sebesar 4,31%. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan kredit bermasalah.

Dalam penyaluran dananya kepada masyarakat melalui produk kreditnya PT BPR BKK Pati (Perseroda) memiliki kinerja yang baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio NPL dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan.

Kredit bermasalah yang besar dalam industri perbankan membawa dampak yang luas, Dari sudut pandang mikro merugikan perkembangan usaha dan kesehatan bank. Sedangkan dari sudut pandang makro mengingat sebagian dana yang dihimpun digunakan untuk menutup kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak lainnya yaitu bank akan cenderung terlalu berhati-hati dalam memberikan kredit. Dengan makin selektifnya pemberian kredit, berakibat pada proses pemberian kredit cenderung lebih lama dari prosedur normal dan ekspansi kredit menjadi turun, sehingga mengakibatkan biaya dana dan bunga kredit menjadi lebih tinggi. Kemudian munculnya wabah pandemi covid-19 mengakibatkan sebagian orang kehilangan mata pencaharian (pekerjaan) akibat adanya PHK, hal tersebut tentunya dapat memicu munculnya kredit bermasalah. Untuk itu sebelum memberikan pinjaman kredit kepada debitur, pihak bank harus lebih berhati-hati dan teliti guna meminimalisir dampak buruk yang mungkin terjadi. Analisis kredit menjadi kunci utama untuk menilai apakah calon debitur tersebut layak untuk menerima pinjaman atau tidak serta penanganan yang tepat untuk masing-masing kasus setiap debitur.

5.2 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Penyaluran kredit kepada para debitur tidak selamanya berjalan dengan lancar, munculnya hambatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu memicu munculnya kredit bermasalah. Dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan, bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis terkait itikad, kemampuan membayar dan kesanggupan debitur

untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian. Hal ini sesuai dengan teori (Kasmir) bahwa prinsip yang dilakukan bank sebelum memberikan suatu fasilitas kredit maka pihak bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut berasal dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang sudah dianalisis oleh penulis didapat hasil bahwa faktor-faktor penyebab munculnya kredit bermasalah (NPL) pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, seperti :

1) Penurunan omzet usaha debitur

Dimasa pandemi saat ini, banyak dari pelaku usaha mengalami penurunan omzet/pendapatan. Bagi pelaku usaha yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan mereka harus membagi pendapatannya untuk membayar angsuran pinjaman. Untuk itu PT BPR BKK PATI (Perseroda) dalam mengatasi persoalan ini, bagi nasabah yang memiliki usaha makanan dan minuman biasanya dari beberapa karyawan ikut berpartisipasi dengan membeli makanan dan minuman yang dijual oleh nasabah sampai ada yang sudah menjadi langganan pegawai PT BPR BKK PATI (Perseroda) serta ikut mempromosikan usaha dari nasabah di lingkungan PT BPR BKK PATI (Perseroda).

2) Terjadinya PHK mendadak di tempat kerja debitur

Hampir dua tahun lamanya pandemi covid-19 belum juga mereda, banyak varian jenis virus baru yang muncul setiap saat. Sehingga sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan akibat adanya PHK. Bagi lembaga keuangan daerah seperti PT BPR BKK PATI (Perseroda) yang memiliki nasabah dengan berbagai jenis profesi, adanya PHK dapat memicu munculnya NPL karena bagi nasabah yang terkena PHK mengalami kendala dalam pembayaran angsuran pinjaman.

- 3) Serta situasi diluar dugaan seperti bencana alam dan pandemi saat ini.

Untuk mencegah munculnya kredit bermasalah maka diperlukan analisis dengan sangat teliti untuk mendapat bukti dan data yang valid. Dalam memperoleh data dan fakta yang akurat terhadap pemberian kredit, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap kemampuan, watak, modal, agunan, serta prospek usaha dari debitur.

Pada Bank Perkreditan Rakyat, analisis kredit dilakukan dengan menggunakan teori analisa kredit 5C meliputi Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition of Economy. Kelima prinsip tersebut sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum bank memberikan persetujuan pemberian kredit. Adapun proses analisa kredit 5C yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) sebagai berikut :

- a) Character

PT BPR BKK PATI (Perseroda) melakukan penilaian aspek karakter dengan mencari informasi dari calon debitur kepada lingkungan sekitarnya. Mulai dari tetangga saudara dan kerabat dekat, tetangga, serta rekan dari calon debitur.

b) Capacity

Setelah menganalisis watak dari debitur maka langkah selanjutnya yaitu analisis faktor kemampuan. Analisis yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) terkait dengan faktor kemampuan yaitu dengan melihat dokumen-dokumen dan catatan terkait usaha dari calon debitur yang bersangkutan.

c) Capital

Analisis modal bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan. Pada aspek ini PT BPR BKK PATI (Perseroda) melakukan survey on the spot dengan mendatangi langsung lokasi tempat usaha dari calon debitur.

d) Collateral

Penilaian barang agunan yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti setiap barang atau dokumen yang menjadi agunan selalu dinotariskan. Jadi jaminan yang dicantumkan dalam permohonan kredit milik pribadi dengan ketentuan berupa barang material

maupun surat berharga yang harganya ditaksir dan ditentukan oleh pihak bank.

e) Condition of economy

Dalam aspek ini PT BPR BKK PATI (Perseroda) melakukan analisis dengan melihat kondisi ekonomi dari calon debitur dan kondisi ekonomi secara global. Memastikan bahwa kondisi ekonomi calon debitur dalam keadaan yang baik. Dalam arti mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tidak terlilit hutang lain dan mampu mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit.

5.3 Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam penanganan kredit bermasalah di PT BPR BKK PATI (Perseroda) menggunakan konsep yang terpadu dan terarah untuk mengurangi hambatan-hambatan sampai upaya perbaikan yang terjadi. Untuk itu penyelesaian kredit bermasalah di PT BPR BKK PATI (Perseroda) menggunakan 2 metode tindakan penyelesaian yaitu menuntaskan kredit bermasalah yang sudah ada dan melakukan tindakan pencegahan munculnya kredit bermasalah baru. Kredit yang diberikan oleh setiap bank tentu mengandung resiko, sehingga dalam proses pelaksanaannya harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat. Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan membayar kewajiban menjadi faktor penting. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, petugas analisa kredit pada PT BPR BKK PATI

(Perseroda) yang sering disebut fungsi kredit melakukan penilaian dengan seksama dan teliti terkait analisa kredit 5C.

Dalam menghadapi kredit bermasalah, PT BPR BKK PATI (Perseroda) melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan beberapa usaha meliputi beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti :

- a) Jumlah kredit
- b) Jangka waktu kredit
- c) Jenis kredit
- d) Jaminan
- e) Kekuatan/kelemahan dari kreditur dan debitur

Apabila beberapa faktor tersebut sudah dipelajari dan dianalisis dengan seksama mengingat bank akan menentukan dan memutuskan tindakan yang akan diambil karena setiap kredit yang diberikan membutuhkan penanganan yang berbeda. Hal ini karena kondisi dari masing-masing kredit dan debitur berbeda. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) untuk menuntaskan kredit bermasalah yang sudah ada yaitu dengan upaya penanganan kredit bermasalah melalui:

- 1) Musyawarah

PT BPR BKK PATI (Perseroda) melakukan musyawarah untuk membicarakan masalah penyelesaian kredit macet secara baik-baik, biasanya disertai dengan tawar-menawar yang panjang terkait perpanjangan masa penyelesaian. Musyawarah ini dilakukan oleh debitur dengan kreditur, dimana kreditur diwakili oleh pihak fungsi

kredit apabila kredit macet terjadi sebelum memenuhi $\frac{1}{2}$ (setengah) waktu perjanjian pembayaran angsuran. Misalkan waktu pembayaran angsuran 24 bulan jatuh tempo setiap awal bulan, dan pada angsuran ke-10 terjadi kredit macet, maka dilakukan musyawarah antara kreditur dengan debitur. Musyawarah yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) dalam upaya penyelamatan/kebijakan dari bank apabila debitur masih potensial, maka pihak bank melakukan kompensasi dengan cara membuka akad kredit baru melalui 3R yaitu:

a) Resceduling (Penjadwalan Kembali)

PT BPR BKK PATI (Perseroda) melakukan upaya penjadwalan kembali apabila debitur masih memiliki prospek usaha yang baik, jikapun mengalami kesulitan sifatnya hanya sementara. Upaya penjadwalan kembali ini dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Pada tahap resceduling ini nasabah yang mengajukan keringanan terkait dengan adanya kendala dalam pembayaran angsuran kepada PT BPR BKK PATI (Perseroda) kemudian pihak pegawai bagian penyelamat kredit PT BPR BKK PATI (Perseroda) menyampaikannya kepada direksi bagian pemasaran terkait pengajuan keringanan pembayaran angsuran nasabah, proses tersebut dilakukan secara internal. Sehingga untuk hasil keputusannya yang menentukan adalah direktur pemasaran, apabila nasabah menyetujui hasil keputusan tersebut maka tahap rescheduling ini akan dilakukan.

b) Reconditioning (Persyaratan kembali)

Persyaratan ulang yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) dengan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit dengan tetap mempertahankan plafond kredit yang sudah ada, perubahan yang bisa dilakukan seperti merubah tingkat suku bunga, jadwal angsuran, serta jangka waktu kredit.

c) Restructuring (Penataan Kembali)

PT BPR BKK PATI (Perseroda) sebagai pengelola kredit dalam upaya mengurangi dampak kerugian akibat adanya kredit bermasalah. Tindakan penyelamatan kredit atau restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) untuk menyetatkan kembali usaha debitur yang mengalami penurunan dalam hal keuangan supaya dapat kembali memenuhi kewajiban berupa pokok dan bunga kepada bank. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 7 Tahun 2005 Pasal 1 Angka 25, bahwa Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Program restrukturisasi kredit di PT BPR BKK PATI (Perseroda) tidak hanya diberikan kepada debitur besar melainkan pada debitur mikro dan kecil. Hal ini bertujuan untuk menekan tunggakan kredit yang terjadi.

Layak atau tidaknya rencana restrukturisasi kredit menjadi pedoman pihak bank dalam pengambilan keputusan. Hasil dari keputusan yang diperoleh tergantung pada hasil analisa PT BPR BKK PATI (Perseroda) terhadap kondisi aktiva dan passiva dari usaha debitur yang tercantum dalam laporan keuangan debitur. Pihak komite PT BPR BKK PATI (Perseroda) melakukan monitoring untuk memperoleh data yang valid terhadap hutang debitur. Hutang yang dianggap layak untuk diberikan restrukturisasi kredit meliputi :

- 1) Usaha debitur masih memiliki prospek yang baik kedepannya, sehingga mampu melunasi kewajiban dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Apabila kreditur memperoleh pelunasan hutang dari debitur dengan jumlah lebih besar melalui restrukturisasi.

Pada prinsipnya restrukturisasi kredit bertujuan untuk memperbaiki kualitas kredit, sehingga ditetapkan prinsip bahwa restrukturisasi kredit hanya boleh dilakukan kepada debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik dalam jangka waktu tertentu, serta diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga. Adapun peran dari satuan tugas restrukturisasi kredit yaitu sebagai fasilitator yang melakukan langkah-langkah koordinatif kepada kreditur dan debitur dalam penanganan penyelesaian kredit bermasalah.

2) Penagihan

PT BPR BKK PATI (Perseroda) melakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung. Penagihan secara tidak langsung dilakukan melalui telephone oleh fungsi kredit. Namun, apabila fungsi kredit mengalami kendala saat melakukan penagihan secara tidak langsung dan jatuh tempo telah memenuhi kriteria macet, maka proses penagihan dilakukan secara langsung dengan mengirim team penagih (*Debt Colector*) yang terdiri dari pegawai bank yaitu fungsi kredit mendatangi tempat tinggal atau lokasi usaha debitur. Dalam penagihan ini, sistem yang dijalankan dengan cara musyawarah. Pihak PT BPR BKK PATI (Perseroda) melakukan penagihan apabila kredit macet terjadi sebelum memenuhi $\frac{1}{2}$ dari jangka waktu pembayaran angsuran.

Debt collector ini bertugas untuk mencari serta menemukan debitur untuk melakukan penagihan. Penagihan secara langsung dirasa menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi kredit bermasalah yang terjadi. Namun, saat melakukan penagihan pun muncul berbagai kendala, diantaranya seperti : sering tidak bertemu langsung dengan debiturnya; jikapun bertemu debitur, debiturnya belum ada uang untuk membayar; serta debitur memberi janji akan membayarkan angsuran pada tanggal sekian sehingga tim penagih pun tidak berhasil menagih angsuran pinjaman.

3) Penyitaan

Pihak dari PT BPR BKK PATI (Perseroda) melakukan penyitaan barang jaminan untuk mengambil kredit. Penyitaan dilakukan setelah surat peringatan (SP1) dan surat peringatan 2 (SP2) yang tidak dihiraukan oleh debitur, maka pihak BPR akan mengirimkan surat peringatan 3 (SP3) yang berisi tentang pemberitahuan penyitaan barang jaminan. Selain itu PT BPR BKK PATI (Perseroda) dalam menangani kredit bermasalah yang tidak menggunakan jalur yuridiksi pengadilan, yaitu dengan : Melakukan pengawasan secara langsung pada debitur untuk mengetahui perkembangan dari usaha debitur serta dengan memperpanjang jangka waktu kredit sampai angsuran pokok lunas.

Metode / cara lain yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) untuk mencegah munculnya Kredit Bermasalah baru yaitu dengan upaya pencegahan, diantaranya :

- 1) Melakukan pengawasan dengan survey kredit yang benar dan hati-hati sesuai dengan SOP perkreditan
- 2) Setiap debitur wajib ditelusuri melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK)
- 3) Serta selalu berpedoman pada prinsip analisa kredit 5C dengan melakukan penilaian secara obyektif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang dimiliki belum optimal dikarenakan masih kurangnya disiplin kerja pada beberapa pegawai. Salah satu penyebabnya karena kebiasaan yang kurang mendapat sanksi tegas.
- 2) Pemanfaatan teknologi bagi sebuah perusahaan sangatlah penting untuk diterapkan akan tetapi PT BKK PATI (Perseroda) belum sepenuhnya menerapkan teknologi dalam proses operasionalnya. Seperti semua transaksi perbankan yang masih dilakukan secara offline.
- 3) Proses pemberian kredit di PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional sudah memenuhi persyaratan kredit yang berlaku . Keefektifan pemberian kredit juga dapat dilihat dari laporan keuangan Bank BKK PATI yang menunjukkan angka 4,73% pada NPL tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 100% kredit yang disalurkan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) adalah kredit yang efektif.
- 4) Faktor penyebab munculnya kredit bermasalah pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) disebabkan oleh faktor eksternal, antara lain :
 - Penurunan omzet usaha debitur

- Terjadinya PHK mendadak di tempat kerja debitur
 - Serta situasi diluar dugaan seperti bencana alam atau pandemi seperti saat ini.
- 5) Analisa kredit 5C kepada calon debitur yang dilakukan oleh PT BPR BKK PATI (Perseroda) dianggap sudah cukup memadai dan efektif.
- 6) Penanganan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) menggunakan 2 metode yaitu penanganan kredit bermasalah yang sudah ada dan pencegahan munculnya kredit bermasalah baru dengan upaya :
- a) Tindakan represif, yaitu penanganan kredit bermasalah yang sudah ada yaitu dengan melalui : Musyawarah dengan cara Rescheduling (Penjadwalan Kembali), Reconditioning (Persyaratan Kembali), Restructuring (Penataan Kembali), Penagihan serta Penyitaan.
 - b) Tindakan Preventif , yaitu mencegah munculnya kredit bermasalah baru dengan cara :
 - Melakukan pengawasan survey kredit dengan benar, hati-hati dan sesuai SOP perkreditan
 - Setiap debitur wajib ditelusuri melalui SLIK
 - Serta selalu berpedoman pada analisa kredit 5C dengan penilaian secara obyektif.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini diketahui bahwa NPL pada PT BPR BKK PATI (Perseroda) pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan angka NPL, sehingga strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja bank harus diperhatikan dengan seksama, untuk itu penulis akan merekomendasikan terkait upaya mengantisipasi kredit bermasalah sebaiknya bank meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap kredit yang diberikan baik mengenai manajemen maupun keadaan debitur tidak hanya pada saat itu saja melainkan dalam jangka panjang sampai kredit tersebut lunas, kemudian sebelum kredit diberikan kepada calon debitur pihak bank harus lebih memperhatikan kriteria dari debitur guna menghindari munculnya kredit bermasalah.

6.2.2 Perusahaan

Dalam upaya untuk meningkatkan kemajuan perusahaan maka diperlukan saran dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis akan memberikan rekomendasi meliputi :

- a) Sehubungan dengan permasalahan yang penulis sampaikan sebelumnya, bahwa di PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional dalam pengamatan penulis selama masa magang, terdapat beberapa permasalahan meliputi kurangnya disiplin kerja sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses operasional serta upaya penanganan kredit bermasalah.

Sehingga penulis akan memberikan rekomendasi dari permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain :

- 1) Disiplin kerja bagi pegawai PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional dapat ditingkatkan apabila ada kesadaran diri dari pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta melalui pemberian motivasi terkait disiplin kerja setiap pagi saat apel pagi.
- 2) Dalam dunia modern saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keharusan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan menerapkan teknologi dapat membantu memudahkan debitur dan kreditur dalam bertransaksi. PT BPR BKK PATI (Perseroda) dapat membuat suatu aplikasi serupa dengan *e-banking* pada bank umum dengan tampilan sederhana yang dapat dipahami oleh semua kalangan nasabahnya. Sehingga nasabah tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi yang sudah tersedia dalam fitur aplikasi tersebut.
- 3) Berdasarkan data yang telah penulis lampirkan terkait dengan tingkat NPL PT BPR BKK PATI (Perseroda) dari tahun 2018-2020 diperoleh hasil bahwa PT BPR BKK PATI (Perseroda) dalam meyalurkan dana kreditnya kepada nasabah memiliki kinerja yang baik. Untuk itu penulis merekomendasikan dalam proses analisis kredit harus dilakukan pengecekan berkali-kali oleh semua rekan bagian tersebut serta lebih meningkatkan

prinsip kehati-hatian supaya nilai NPL untuk tahun-tahun selanjutnya tidak mengalami kenaikan.

- b) Terkait dengan mahasiswa magang perusahaan, bahwa tujuan dari dilaksanakannya program magang yaitu meningkatkan soft skill mahasiswa, untuk itu supaya pihak perusahaan memberikan bimbingan serta arahan kepada mahasiswa magang mengenai bidang pekerjaan dan tugas-tugas selama masa magang untuk meningkatkan potensi yang dimiliki, dengan demikian bisa menjadi bekal mahasiswa setelah lulus nantinya.

6.2.3 Program Studi

Memberikan kesempatan lebih banyak kepada mahasiswa untuk mengikuti program magang guna meningkatkan kemampuan terutama pada soft skill mahasiswa, karena dalam dunia kerja saat ini tidak hanya menekankan pada hard skill saja melainkan juga pada soft skill. Untuk itu penulis memberikan rekomendasi kepada program studi terkait dengan program MB-KM supaya program ini bisa disosialisasikan secara lebih rinci kepada mitra perusahaan supaya pihak perusahaan yang belum mengetahui program tersebut menjadi paham dan bisa menyiapkan program kerja untuk mahasiswa magang. Selain rekomendasi tersebut penulis juga merekomendasikan program studi agar bisa menjalin lebih banyak lagi kemitraan dengan perusahaan dan instansi dari mulai skala kecil hingga besar yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

BAB VII

REFLEKSI DIRI

Refleksi diri merupakan gambaran dari perasaan yang dirasakan oleh penulis selama mengikuti program magang di PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional. Selama masa magang tentunya penulis merasa bangga karena bisa belajar secara langsung bersama dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia kerja. Akan tetapi selama masa magang tentunya tidak selalu berjalan dengan baik apalagi dimasa pandemi saat ini. Munculnya berbagai tantangan pun dirasakan oleh penulis. Pengalaman pertama yang penulis rasakan saat magang di PT BPR BPKK PATI (Perseroda) yaitu rasa canggung kepada beberapa karyawan karena belum saling kenal. Kemudian rasa takut karena dimasa pandemi saat ini penulis harus bersosialisasi dengan banyak orang baru. Akan tetapi seiring berjalannya waktu penulis merasa nyaman berada di lingkungan kerja di PT BPR BKK PATI (Perseroda) dengan bimbingan serta arahan yang diberikan oleh beberapa karyawan kepada penulis, budaya kerja yang dimiliki, serta penulis diberikan kesempatan untuk mempelajari dan praktek langsung terkait dunia perbankan di PT BPR BKK PATI (Perseroda). Dengan mengikuti program magang ini secara tidak langsung penulis memperoleh wawasan yang luas secara mandiri sebab belajar dalam kelas saja tidak cukup untuk menunjang pengalaman penulis setelah lulus nantinya. Jadi ada beberapa hal positif yang penulis terima selama perkuliahan yang relevan dengan pekerjaan selama magang di PT BPR BKK PATI (Perseroda) Kantor Pusat Operasional diantaranya :

- a) Membangun relasi lebih luas dengan orang-orang dari berbagai kalangan.

Membangun relasi dengan orang-orang baru akan lebih mudah selama kita menjadi seorang mahasiswa. Dengan mengikuti program magang secara tidak langsung penulis mampu membangun skill komunikasi serta belajar untuk saling menghargai pendapat dan saran orang lain.

- b) Mampu bekerja sama dengan tim

Selama masa kuliah tentunya bekerjasama dengan tim terus diasah melalui kerja kelompok, ikut dalam organisasi akan dapat menunjang pengalaman setelah lulus nantinya. Kerjasama dalam tim ini sangat dirasakan oleh penulis ketika ada pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit maka anggota tim yang lain akan membantu dalam menyelesaikan tugas tersebut sehingga kerja sama dalam tim ini menjadi sangat penting dalam dunia kerja

- c) Meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin waktu dan tugas terhadap pekerjaan

Memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap tugas-tugas yang diberikan. Mampu manage waktu dengan baik, sehingga dapat melatih penulis untuk menjadi individu yang profesional dalam pekerjaan. Mampu memegang tanggung jawab kerja dan mampu manage waktu dengan baik menjadi kunci sukses dalam meniti karir.

Banyak dari perguruan tinggi yang sudah memiliki program-program yang mampu memberikan soft skill tambahan untuk para mahasiswanya. Seperti

program magang yang sangat bermanfaat untuk penulis. Manfaat dari program magang yang sudah diikuti oleh penulis antara lain :

1) Menunjang karir dan soft skill

Dengan mengikuti program magang penulis tentu mendapat banyak ilmu dan pengalaman baru bisa terjun ke dunia kerja, sehingga setelah lulus nantinya bisa mendapat peluang untuk diterima menjadi karyawan di tempat magang. Kemudian sudah lebih dulu mengetahui gambaran nyata dan ikut terlibat langsung di dunia kerja. Program magang ini ibarat gerbang awal untuk masuk dan mengetahui seluk-beluk dunia kerja yang sesungguhnya. Sehingga setelah lulus nanti penulis tidak kaget dengan dunianya yang baru yaitu dunia kerja.

2) Relasi baru yang didapatkan di tempat magang.

Secara tidak langsung tentunya penulis akan beradaptasi dengan lingkungan kerja, bertemu dengan orang-orang baru, berkomunikasi tentang pekerjaan akan memberikan manfaat besar bagi penulis setelah lulus nantinya.

3) Tingginya rasa ingin tahu

Ketika berada di lingkungan yang baru seperti tempat magang, pasti rasa ingin tahu terhadap perusahaan tersebut tinggi, hal tersebut yang mampu membuat penulis memiliki kemauan tentang belajar hal baru juga tinggi sehingga kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dapat diselesaikan.

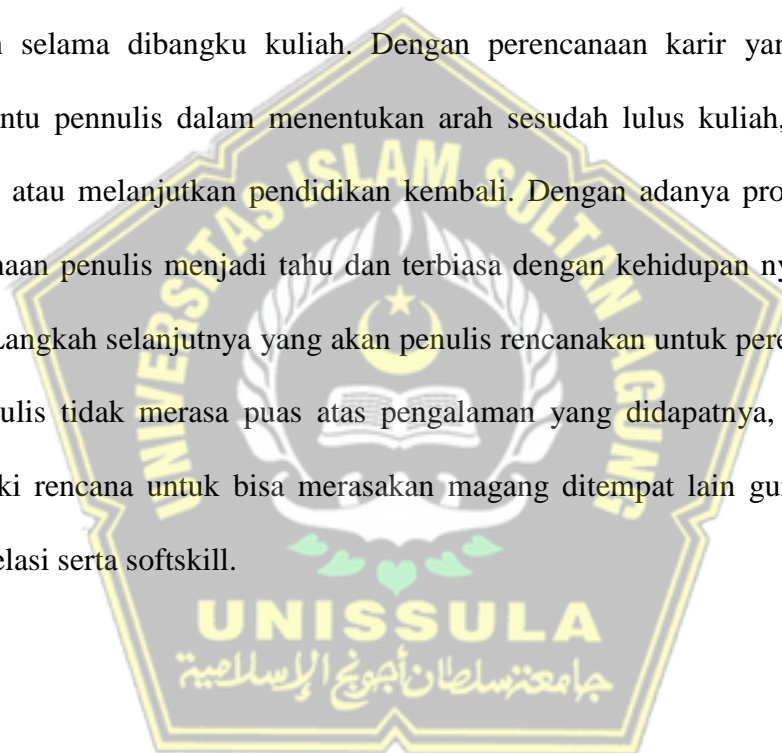
Selain manfaat yang bisa diperoleh tentunya ada kekurangan soft skill yang dimiliki oleh penulis selama magang, diantaranya : Kemampuan berkomunikasi (berbicara) didepan umum, masih banyak kekurangan yang belum begitu terbiasa mampu berbicara didepan umum dengan baik, biasanya rasa gugup dan takut yang dirasakan. Kemudian adanya tugas yang belum bisa selesai tepat waktu karena belum terbiasa dengan tugas-tugas yang ada di tempat magang.

Program magang merupakan program yang sangat menunjang softskill mahasiswa, karena selama magang penulis diberikan kesempatan untuk mempelajari semua ilmu dan praktek langsung bersama orang-orang yang lebih berpengalaman dibidangnya. Seperti mengolah data menggunakan software yang tidak dipelajari di kelas saat kuliah, menganalisis hasil data, membuat keputusan dari data yang sudah diolah, menyampaikan argumentasi terhadap hasil akhirnya, dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung mampu menunjang kemampuan kognitif penulis, apalagi yang sesuai dengan basic yang sudah dimiliki. Namun, tentu ada kekurangan dalam kemampuan kognitif yang dimiliki penulis selama magang, seperti karena masih proses belajar jadi penulis belum bisa optimal dalam menjalankan tugas yang diberikan dan tugas-tugas yang diberikan pun masih sederhana.

Kemudian terkait dengan kunci sukses dalam bekerja, setelah menyelesaikan tugas magang perusahaan, menurut penulis kunci sukses dalam bekerja meliputi : Tidak mudah mengeluh, profesional dalam bekerja, memiliki kerjasama tim yang baik, tidak menunda pekerjaan, serta fokus pada pekerjaan. Suatu pekerjaan akan dapat cepat selesai dengan hasil yang baik apabila didasarkan pada kerjasama dalam

tim yang baik. Siapapun yang sudah selesai mengerjakan tugasnya harus membantu rekan kerja yang membutuhkan. Dari pengalaman tersebut penulis banyak belajar mengenai kunci sukses dalam bekerja.

Untuk rencana pengembangan karir sendiri, setelah selesai mengikuti magang perusahaan penulis memiliki keinginan dalam perencanaan karir yang sesuai dengan passion dan kemampuan yang dimiliki serta karir yang sesuai dengan jurusan selama dibangku kuliah. Dengan perencanaan karir yang tepat akan membantu penulis dalam menentukan arah sesudah lulus kuliah, apakah akan bekerja atau melanjutkan pendidikan kembali. Dengan adanya program magang perusahaan penulis menjadi tahu dan terbiasa dengan kehidupan nyata di tempat kerja. Langkah selanjutnya yang akan penulis rencanakan untuk perencanaan karir ini penulis tidak merasa puas atas pengalaman yang didapatnya, namun sudah memiliki rencana untuk bisa merasakan magang ditempat lain guna menambah ilmu, relasi serta softskill.



DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Yanne, and Febsri Susanti. 2019. "Pengaruh Stress Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Pt. Frisian Flag Indonesia Wilayah Padang." doi: 10.31227/osf.io/et4rn.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri. 2021. "Berita Resmi Statistik." *Bps.Go.Id* (27):1–16.
- Dan, Kedisiplinan, and Motivasi Kerja. 2022. "Kedisiplinan Dan Motivasi Kerja, Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan." 5(1):10–19.
- Fianto, Bayu Arie, Hayu Maulida, and Nisful Laila. 2019. "Determining Factors of Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institutions." *Heliyon* 5(8). doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02301.
- Firmansyah, Arif, and jhon fernos. 2019. "Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan (Npl) Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang." doi: 10.31227/osf.io/gcj94.
- Idris, Abdi Akbar. 2013. "Pengaruh Teknologi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan." *Economix* 1(1):125–33.
- Irawati, Nisrul, Azhar Maksum, Isfenti Sadalia, and Iskandar Muda. 2019. "Financial Performance of Indonesian's Banking Industry: The Role of Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan and Size." *International Journal of Scientific and Technology Research* 8(4):22–

26.

- Kusumawardhani, Fajar, and Muanas Muanas. 2020. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8(2):137–46. doi: 10.37641/jiakes.v8i2.372.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. "Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat." *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018* 1–68.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /Pojk.03/2016 Tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa De." 1–24.
- Putri, Eriska Ajeng Ade, Elva Nuraina, and Elana Era Yusdita. 2020. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau Dari Persepsi Nasabah." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7(02):185–96. doi: 10.35838/jrap.v7i02.1616.
- Rismayadi, Budi, and Mumun Maemunah. 2016. "Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Serta Dampaknya Pada Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Concord Indonesia)." *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif* 2(1):124–35. doi: 10.36805/manajemen.v2i1.181.

- Said Muhammad Rizal, and Radiman Radiman. 2019. "Pengaruh Motivasi, Pengawasan, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 2(1):117–28. doi: 10.30596/maneggio.v2i1.3649.
- Sofyan, Mohammad. 2019. "Analysis Financial Performance of Rural Banks in Indonesia." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 3(03):255–62. doi: 10.29040/ijebar.v3i03.588.
- Susanti, R. A. D. 2019. "Pola Penanganan Kredit Macet Pada Pt Oto Multiartha Finance Cabang Malang." *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 3(2):156–64.
- Wasiaturrahma, Raditya Sukmana, Shochrul Rohmatul Ajija, Sri Cahyaning Umi Salama, and Ahmad Hudaifah. 2020. "Financial Performance of Rural Banks in Indonesia: A Two-Stage DEA Approach." *Heliyon* 6(7):e04390. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e04390.

